



RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2023



MAINI ASNA, SKM, M.SI
Kepala Dinas PPPA Dumai

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, pemasalahan, kebutuhan nyata, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. RENJA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kota Dumai Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai tahun 2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2016-2021. Kedua dokumen acuan tersebut merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 yang diarahkan untuk mewujudkan Visi Kota Dumai “Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”.

Dalam rangka mempertanggungjawabkan keberhasilan RENJA dan kelancaran tugas dan fungsi Dinas PPPA Kota Dumai melalui target rencana kerja dan pencapaian kinerja ini untuk lebih meningkatkan kinerja serta kerja sama semua Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas PPPA Kota Dumai.

Akhirnya kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam menyusun RENJA Tahun 2023 ini dan semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Dumai, 02 Februari 2022
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Dumai,



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP: 19680529 198903 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	39
2.3 Isu – isu Penting Penyeleenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	45
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	65
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI	67
3.1 Telaahaaan Terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Dumai	68
3.3 Program dan Kegiatan	69
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian	82
4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut	83

DAFTAR TABEL

Tabel T-C. 29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah	23
Tabel T-C. 30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.....	44
Tabel T-C. 31	Review Terhadap Rancangan Awal Rkpdi Tahun 2023 Kota Dumai.....	52
Tabel T-C. 32	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Dumai.....	66
Tabel T-C. 33	Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 Dan Perkiraan Maju Tahun 2023	73
Tabel 4.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2026	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja ini merupakan perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan pagu indikatif.

Proses penyusunan rencana kerja meliputi : (1) Persiapan Penyusunan Renja; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja; (3) Penyusunan Rancangan Renja; (4) Pelaksanaan Forum/ Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renja; (6) Penetapan Renja.

Renja memiliki keterkaitan dengan perencanaan baik ditingkat Nasional, Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Mengingat arti strategis dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan tentang :

1. Pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2 LANDASAN HUKUM

Adapun yang menjadi Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya daerah Tingkat II Dumai;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kota Dumai;

9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.
10. Peraturan Walikota Dumai Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2023

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 adalah :

1. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2023.
2. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada di Renja ke dalam KUA dan PPAS Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelegaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu disesuaikan antara target yang telah ditetapkan dengan Realisasi yang telah dicapai. Pelaksanaan Renja Tahun Lalu diharapkan dapat menjadi perbandingan untuk Renja Tahun berjalan.

Berikut ini merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai tahun 2021 dan realisasi APBD DPPPA Kota Dumai Tahun 2022 :

- 1.1.1 Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, yaitu : Semua program kegiatan memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan
- 1.1.2 Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan, antara lain :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2021 sebesar Rp. 8,204,807,963,- dan terealisasi sebesar Rp. 7,247,235,621,- (88,33%). Adapun realisasi dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yaitu :

- Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 60,694,000,- dan terealisasi sebesar Rp 58,449,540,- dengan indikator dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target kinerja 6 Dokumen dan terealisasi sebesar 6 Dokumen atau 100%, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 10,826,350,- dan terealisasi sebesar Rp 10,535,040,- (97,31%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersusunnya dokumen perencanaan dengan target 3 dokumen.

- 2) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 6,585,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,579,000,- (99,90%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi penyusunan RKA-SKPD dan tersusunnya dokumen RKA-SKPD dengan target 1 dokumen.
- 3) Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3,160,150,- dan terealisasi sebesar Rp. 3,157,000,- (99,90%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD dan tersusunnya dokumen perubahan RKA-SKPD dengan target 1 dokumen.
- 4) Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 4,559,100,- dan terealisasi sebesar Rp. 4,555,500,- (99,92%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi penyusunan DPA dan tersusunnya dokumen perubahan DKA-SKPD dengan target 1 dokumen.
- 5) Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 1,985,550,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,929,000,- (97,15%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi penyusunan perubahan DPA dan tersusunnya dokumen perubahan DPA-SKPD dengan target 1 dokumen.
- 6) Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 24,820,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 23,039,000,- (92,82%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan target 12 bulan dan tersusunnya dokumen laporan capaian kinerja dengan target 3 dokumen.
- 7) Evaluasi kinerja perangkat daerah. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 8,756,750,- dan terealisasi sebesar

Rp. 8,655,000,- (98,84%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah dengan target 4 kali.

- Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4,621,029,384,- dan terealisasi sebesar Rp. 4,083,785,728,- atau dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu persentase administrasi keuangan perangkat daerah dengan target kinerja 100 % dan terealisasi 100%, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 4,610,624,834,- dan terealisasi sebesar Rp. 4,073,381,728,- (88,35%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya gaji dan tunjangan ASN dengan target 14 bulan.
 - 2) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 10,404,550,- dan terealisasi sebesar Rp.10,404,000,- (99,99%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi penyusunan dan laporan keuangan dengan target 12 bulan dan tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun dengan target 1 dokumen.
- Kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 29,491,550,- dan terealisasi sebesar Rp. 29,127,020,- atau (98,76%) dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah dengan target kinerja 100% dan terealisasi 100%, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 29,491,550,- dan terealisasi sebesar Rp. 29,127,020,- (98,76%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu jumlah dokumen inventarisasi barang milik daerah dengan target 1 dokumen.

- Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 316,747,847,- dan terealisasi

sebesar Rp. 292,709,364,- atau 100% dengan indikator keluaran dari persentase administrasi umum perangkat daerah dengan target 100%, dengan sub kegiatan :

- 1) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 13,096,169,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,574,500,- (50,20%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya komponen listrik/ penerangan bangunan kantor dengan target 12 bulan.
- 2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 86,177,950,- dan terealisasi sebesar Rp. 83,955,750,- (97,42%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya kebutuhan alat tulis kantor dengan target 12 bulan.
- 3) Penyediaan peralatan rumah tangga. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 16,322,250,- dan terealisasi sebesar Rp. 12,229,000,- (74,92%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya jasa tenaga keamanan kantor dengan target 12 bulan dan tersedianya peralatan rumah tangga dengan target 12 bulan.
- 4) Penyediaan bahan logistik. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 25,235,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 21,520,900,- (85,28%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya bahan logistik dengan target 12 bulan.
- 5) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 57,815,478,- dan terealisasi sebesar Rp. 50,435,008,- (87,23%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dengan target 12 bulan.
- 6) Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 8,407,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 8,304,570,- (98,78%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya bahan bacaan dan informasi aparatuer dengan target 12 bulan.

- 7) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 109,693,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 109,689,636,- (100%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan target 1 Tahun.
- Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 556,059,517,- dan terealisasikan sebesar Rp. 549,662,000,- dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu tersedianya jasa kebersihan kantor dengan target kinerja 12 bulan dan terealisasi sebesar 12 bulan atau 100%, dengan sub kegiatan :
 - 1) Pengadaan mebel. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 24,441,900,- dan terealisasi sebesar Rp. 23,425,000,- (95,84%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya mebel kantor dengan target 12 bulan.
 - 2) Pengadaan peralatan mesin dan lainnya. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 82,284,300,- dan terealisasi sebesar Rp. 80,541,000,- (97,88%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya peralatan gedung kantor dengan target 12 bulan.
 - 3) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 449,333,317,- dan terealisasi sebesar Rp. 445,696,000,- (99,19%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terpeliharanya gedung kantor secara berkala dengan target 12 Bulan.
 - Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 809,459,025,- dan terealisasikan sebesar Rp. 797,696,730,- dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 12 Bulan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 450,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,- (0,00%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya penyediaan surat menyurat dengan target 12 bulan.

- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 98,669,025,- dan terealisasi sebesar Rp. 95,756,730,- (97,05%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya belanja telpon, belanja air, dan belanja listrik dengan target 12 bulan.
- 3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 13,740,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13,740,000,- (100%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 12 bulan.
- 4) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 696,600,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 688,200,000,- (98,79%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersedianya jasa administrasi keuangan dengan target 12 bulan.
 - Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 157,872,482,- dan terealisasikan sebesar Rp. 151,748,000,- dengan indikator keluaran dari kegiatan yaitu terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan target 12 bulan dengan sub kegiatan :
 - 1) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 105,650,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 105,156,000 (99,53%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional secara rutin/berkala dengan target 12 bulan.
 - 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 3,000,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1,266,000,- (42,20%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dengan target 12 bulan.

- 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 5,680,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5,680,000,- (100%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terpeliharanya peralatan Gedung kantor secara rutin/ berkala dengan target 12 bulan dan terpeliharanya perlengkapan Gedung kantor secara rutin/ berkala dengan target 12 bulan.
 - 4) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 36,832,482,- dan terealisasi sebesar Rp. 32,936,000,- (89,42%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas dengan target 12 bulan dan terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat rumah Gedung kantor dengan target 12 bulan
 - 5) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 6,710,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,710,000,- dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terpeliharanya rumah dinas dengan target 12 bulan.
- b. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
- Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2021 sebesar Rp. 368,711,870,- dan terealisasi sebesar Rp. 352,371,800,- . Dengan indikator keluaran dari program yaitu meningkatnya persentase ARG di Kota Dumai dengan target 5%. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut :
- Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 89,847,250,- dan terealisasi sebesar Rp. 85,000,600,- dengan indikator keluaran persentase pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah dengan target 100%, dengan sub kegiatan :
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 40,546,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 36,207,600,-

- (89,30%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota dengan target 1 tahun.
- 2) Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 49,301,250,- dan terealisasi sebesar Rp. 48,793,000,- (98,97%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu tersusunnya rumusan daftar Peraturan Daerah tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kota Dumai (1 rumusan Peraturan Daerah), jumlah pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG (6 PD dan 7 Kecamatan) dengan target 1 Peraturan Daerah dan jumlah pendampingan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) termasuk PPRG dengan target 7 kecamatan.
- Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota. Anggaran dinas yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 190,368,830,- dan terealisasi sebesar Rp. 189,162,200,- dengan indikator keluaran terlaksananya pemberdayaan perempuan dibidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan dengan target 7 Kecamatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 190,368,830,- dan terealisasi sebesar Rp. 189,162,200,- (99,37%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi (100 orang) dengan target 100 orang dan terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik (100 orang) dengan target 100 orang.
 - Kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 88,495,790,- dan terealisasi sebesar Rp. 78,209,000,- dengan indikator keluaran

terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dengan target 1 kegiatan, dengan sub kegiatan :

- 1) Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 88,495,790,- dan terealisasi sebesar Rp. 78,209,000,- (88,38%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender dengan target 5 Kegiatan.

c. Program Perlindungan Perempuan

Anggaran Yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2021 sebesar Rp. 266,704,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 250,763,851,- dengan indikator keluaran dari program ini yaitu meningkatnya perlindungan bagi perempuan dengan target 10%. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program perlindungan perempuan adalah sebagai berikut :

- Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp 34,940,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 34,490,000,- dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu terselenggaranya forum grup diskusi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dengan target 1 kegiatan.
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini yaitu Rp. 34,940,000,- (100%) dan terealisasi sebesar Rp. 34,940,000,- dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan dengan target 7 kecamatan.
- Kegiatan penyediaan layanan rujukan dan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 72,677,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 65,169,451,- dengan indikator

keluaran dari kegiatan tersebut yaitu tersedianya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan dengan target 1 UPT PPA.

1) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 19,746,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19,746,000,- (100%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu jumlah pengaduan masyarakat terkait korban kekerasan pada perempuan dengan target 30 orang.

2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 52,931,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45,423,451,- (85,82%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota dengan target 1 tahun.

- Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 159,087,600,- dan terealisasi sebesar Rp. 150,654,400,- dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan dengan target 12 bulan.

1) Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan penanganan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak). Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 111,196,910,- dan terealisasi sebesar Rp. 108,246,400,- (96,78%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu jumlah peserta peningkatan kapasitas sumber daya satuan tugas perlindungan perempuan dan korban kekerasan dengan target 20 orang, terlaksananya bimbingan teknis satuan tugas tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan target 20 orang, terlaksananya pelatihan manajemen kasus bagi SDM UPTD PPA

(target 30 orang), dan terlaksananya sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA dengan target 30 orang.

- 2) Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 47,240,690,- dan terealisasi sebesar Rp. 42,408,000,- (89,77%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dengan target 7 kecamatan melalui satgas perlindungan perempuan dengan target 7 kecamatan dan terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui Satgas TPPO dengan target 7 kecamatan.

- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2021 sebesar Rp.16,182,730,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,157,350,- dengan indikator keluaran dari program yaitu meningkatnya kualitas keluarga di Kota Dumai dengan dengan target 55%. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program peningkatan kualitas keluarga adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.16,182,730,- dan terealisasi sebesar Rp. 16,157,350,- dengan indikator keluaran dari kegiatan tersebut yaitu meningkatnya kualitas keluarga kota dumai dengan target 55%, terlaksananya peningkatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan dan hak anak dengan target 7 kecamatan, terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak dengan target 7 kecamatan, dengan sub kegiatan :
 - 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah

kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 6,149,340,- dan terealisasi sebesar Rp. 6,136,650,- (99,79%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya pendampingan peningkatan kualitas keluarga dengan target 3 kecamatan.

- 2) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga tingkat daerah kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 10,033,390,- dan terealisasi sebesar Rp. 10,020,700,- (99,87%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terbentuknya forum perempuan sebagai kepala keluarga dengan target 7 kecamatan dengan target 3 kecamatan.

e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Untuk pelaksanaan program ini pada tahun 2021 telah dianggarkan sebesar Rp. 77,725,248,- dan terealisasi sebesar Rp. 75,284,000,- dengan indikator keluaran dari program ini yaitu meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak dengan target 25%. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program pengelolaan sistem data gender dan anak sebagai berikut:

- Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia dari kegiatan ini sebesar Rp. 77,725,248,- dan terealisasi sebesar Rp. 75,284,000,- dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu meningkatnya pemanfaatan data terpilah gender dan anak target 25%, terlaksananya pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data target 1 dokumen, dan tersedianya data gender dan anak di Kota Dumai dengan target 2 dokumen.

- 1) Penyediaan data gender dan anak di Kewenangan Kabupaten/Kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 34,652,850,- dan terealisasi sebesar Rp. 33,865,000,- (97,73%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu tersedianya data terpisah gender dan anak serta kelembagaan perempuan dan anak di Kota Dumai dengan target 1 dokumen.

- 2) Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 43,072,398,- dan terealisasi sebesar Rp. 41,419,000,- (96,16%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai dengan target 1 dokumen, tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di Kota Dumai dengan target 1 dokumen, dan tersedianya media informasi gender dan anak dengan target 3 jenis.

f. Program Pemenuhan Hak Anak(PHA)

Untuk pelaksanaan program ini, pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp.246,108,265,- dan terealisasi sebesar Rp. 235,755,850,- dengan indikator keluaran dari program ini yaitu meningkatnya capaian skor layak kota layak anak dengan target 700 skor. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program pemenuhan hak anak adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 78,179,495,- dan terealisasi sebesar Rp. 69,117,600,- dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu jumlah lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak dengan target 75 lembaga.

- 1) Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 37,045,195,- dan terealisasi sebesar Rp. 29,550,600,- (79,77%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui PATBM dengan target 250 orang, terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui Puskesmas ramah anak dengan target 10 puskesmas, dan terselenggaranya advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak melalui sekolah ramah anak dengan target 30 sekolah.

- 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelembagaan pemenuhan hak anak kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia dari sub kegiatan ini sebesar Rp. 41,134,300,- dan terealisasi sebesar Rp. 39,567,000,- (96,19%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi terhadap pelembagaan pemenuhan hak anak dengan target 12 bulan.
 - Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 167,928,770,- dan terealisasi sebesar Rp. 166,638,250,- dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu terlaksananya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dengan target 18 lembaga.
 - 1) Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 42,829,320,- dan terealisasi sebesar Rp. 42,055,350,- (98,19%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terselenggaranya komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui bimbingan teknis konvensi hak anak dengan target 50 orang, terselenggaranya komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui bimbingan teknis PATBM, informasi layak anak, dan pusat pembelajaran keluarga target 7 kecamatan, terselenggaranya komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak melalui bimbingan teknis sekolah ramah anak dengan target 30 sekolah, dan terselenggaranya penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak dengan target 7 kecamatan, terselenggaranya penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui parenting edukasi dengan target 7 kecamatan, terselenggaranya penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui pusat pembelajaran keluarga dengan target 7 kecamatan.

- 2) Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 105,496,960,- dan terealisasi sebesar Rp. 105,489,200,- (99,99%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terselenggaranya komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui bimbingan teknis konvensi hak anak dengan target 50 orang, dan terselenggaranya komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui bimbingan teknis PATBM, informasi layak anak, dan pusat pembelajaran keluarga dengan target 7 kecamatan, dan terselenggaranya komunikasi, informasi, dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan kualitas hidup anak melalui bimbingan teknis sekolah ramah anak dengan target 30 sekolah.
- 3) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 19,602,490,- dan terealisasi sebesar Rp. 19,093,700,- (97,40%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas dan kota layak anak target 60 orang, dan terselenggaranya rapat percepatan implementasi kecamatan layak anak dengan target 7 kecamatan.
- g. Program Perlindungan Khusus Anak
- Untuk pelaksanaan kegiatan ini, pada tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 678,021,445,- dan terealisasi sebesar Rp. 353,724,388,- dengan indikator keluaran dari program ini yaitu meningkatnya perlindungan khusus anak dengan target 30%. Adapun realisasi kegiatan dari pelaksanaan program perlindungan khusus anak adalah sebagai berikut:
- Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 52,789,035,- dan terealisasi sebesar Rp.51,588,000,- dengan

indikator keluaran dari kegiatan tersebut adalah terselenggaranya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan target 12 bulan, dan terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak dengan target 12 bulan.

- 1) Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 52,789,035,- dan terealisasi sebesar Rp. 51,588,000,- (97,72%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak dengan target 12 bulan.
 - Kegiatan Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp. 625,232,410,- dan terealisasi sebesar Rp. 302,136,388,- dengan indikator keluaran dari kegiatan ini yaitu tersedianya layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target 12 bulan.
 - 1) Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 60,507,840,- dan terealisasi sebesar Rp. 55,595,700,- (91,88%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota dengan target 80 kasus.
 - 2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus anak kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 478,479,500,- dan terealisasi sebesar Rp. 169,543,538,- (35,43%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota dengan target 12 bulan.
 - 3) Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp.

26,486,890,- dan terealisasi sebesar Rp. 24,634,150,- (93,01%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terlaksananya komunikasi, informasi dan edukasi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target 7 kecamatan, dan terlaksananya pelatihan dan pembinaan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang dengan target 20 orang.

- 4) Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang tersedia untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 59,758,180,- dan terealisasi sebesar Rp. 52,363,000,-(87,62%) dengan indikator keluaran dari sub kegiatan ini yaitu terselenggaranya penguatan jejaring satuan tugas perlindungan anak dengan target 7 kecamatan, dan terlaksananya penguatan jejaring satuan tugas tindak pidana perdagangan orang dengan target 7 kecamatan.

1.1.3 Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang di rencanakan

Tidak ada program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran dari yang direncanakan

1.1.4 Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Tidak ada program/kegiatan yang tidak terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- a. Faktor penyebab terpenuhinya atau melebihinya target kinerja program / kegiatan
 - 1) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara Kepala Dinas dan jajaran yang ada di lingkungan PPPA.
 - 2) Mitra kerja yang mampu menyelesaikan kewajiban secara tepat waktu dan memuaskan
 - 3) Telah terjalinnya kerjasama yang baik antar OPD terkait
 - 4) Meningkatnya peran serta masyarakat dalam hal pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 1.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat Daerah

- a. Meningkatnya kemampuan dan kapasitas SDM Aparatur, SDM pendamping dan manajer kasus
 - b. Bertambahnya sarana pendukung kelancaran tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
 - c. Meningkatnya partisipasi perempuan dibidang politik dan jabatan publik serta meningkatnya kapasitas dan jaringan kelembagaan perempuan dan anak
 - d. Meningkatnya peranan wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera
- 1.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut :
- a. Membangun kerjasama team work
 - b. Melakukan Monitoring Evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang sudah dilakukan, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil pelaksanaan program/kegiatan yang belum/tidak tercapai
 - c. Merumuskan dan membuat perencanaan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program/kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas PPPA dan Pencapaian Renstra Dinas PPPA sampai dengan Tahun 2022 dapat dilihat dalam table 2.9 di bawah ini :

Kode	Nama Perangkat Deereah : Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DEEREAH DAN PENCAPAIAN RENJAH PERANGKAT DEEREAH S/D TAHUN 2022									
			Perkiraan realisasi capaikan target Rensstra OPD s/d tahun 2022	Perkiraan realisasi capaikan target Rensstra OPD s/d tahun 2022	Target kinerja Ursasari/ Sub Ursasari/Bidang	Target kinerja Ursasari/Bidang	Realisasi hasil program kinerja OPD	Realisasi hasil program kinerja OPD	Tanggal Realisasi	Realisasi capaikan target Rensstra OPD s/d tahun 2022	Realisasi capaikan target Rensstra OPD s/d tahun 2022	Realisasi capaikan target Rensstra OPD s/d tahun 2022
2. 8. 1	PROGRAM PENUNJANG PRESENTASE	URUSAN PEMERINTAHAN DAREAH KABUPATEN/KOTA	100%	100%	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	11 Dokumen	100%	100%	100%
2. 8. 1. 2.01	Perencanaan, dan Penganggaran, dan Perencanaan	Jumlah dokumen perangkat daerah evaluasi kinerja perangkat daerah (Dokumen)	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2. 08. 01. 2.01. 01	Penyusunan Dokumen Penugasan	Jumlah dokumen perangkat daerah Daerah (Rensstra dan Renja)	1 Dokumen	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2. 08. 01. 2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2. 08. 01. 2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2. 08. 01. 2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2. 08. 01. 2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%		
2. 08. 01. 2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Kritisir Capaian Kinerja realeksikinerfa OPD (LKJ dan LKJIP)	Laporan Kinerja dan Kritisir Capaian Kinerja realeksikinerfa OPD (LKJ dan LKJIP)	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%		

TABEL T-C. 29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DEEREAH DAN PENCAPAIAN RENJAH PERANGKAT DEEREAH S/D TAHUN 2022

Nama Perangkat Deereah : Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

KOTA DUMAI

PERANGKAT DEEREAH DAN PENCAPAIAN RENJAH PERANGKAT DEEREAH S/D TAHUN 2022

TOTAL DUMAI

Kode	Urusan/Bidang	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi target		Tingkat capaian	Rensstra (%)
				Realisasi target	Realisasi target		
2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat	Jumlah dokumen PK, RKT dan RA	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	100%
2.02	Admistrasi Keuangan	Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
2.03.01	Pendirian ASN	Tunjangan ASN	14 Bulan	14 Bulan	100%	14 Bulan	100%
2.03	Administrasi Barang	Milik Daerah pada SKPD	100%	100%	100%	100%	100%
2.03.06	Penatausahaan Barang	Jumlah dokumen inventarisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	100%
2.05.01	Administrasi Perangkat Daerah	Presensi administrasi barang	100%	100%	100%	100%	100%
2.05.02	Pengadaan Paketan Dinas	Belanja Administrasi	68 Stel	68 Stel	0%	68 Stel	100%
2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dan pelatihan formal (lebih dari 5 hari)	1 Orang	0	0%	1 Orang	100%

Kode	Urusan/Bidang Kegiatan/Sub Kegiatan									
	Target realisasi kinerja		Indikator kinerja		Program kegiatan		Capaian kegiatan		Target realisasi kinerja	
08 01 2.05 11	Bimbingan Teknis	Jumlah engawal yang memungkinkan pelaksanaan perundangan-undangan (5 hari)	3 Orang	0	0%	3 Orang	0	0%	100%	
08 01 2.06 01	Administrasi Umum	Perangkat Dinas	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
08 01 2.06 02	Penyelatan Perjalanan dan Penegakkan Kaitor	Jumlah penyelatan dan penegakkan kaitor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	
08 01 2.06 03	Rumah Tangga	Jumlah penyelatan kaitor rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	
08 01 2.06 04	Penyelatan Bahan Logistik	Jumlah penyelatan bahan logistik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	
08 01 2.06 05	Penyelatan Barang	Jumlah penyelatan barang	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	
08 01 2.06 06	Penyelatan Bahan Baku/Alat	Jumlah penyelatan bahan baku/alat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	
08 01 2.06 07	Penyelatan Perdagangan	Jumlah penyelatan perdagangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	
08 01 2.06 08	Penyelatan Bahan Bakar	Jumlah penyelatan bahan bakar	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	
08 01 2.06 09	Penyelatan Ritel	Jumlah penyelatan ritel	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	
08 01 2.07	Penegakan Barang Milik	Jumlah penegakan barang milik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang	Indikator kinerja	Target kinerja	Target realisasi capaian		Rencana realisasi capaian target	Tingkat capaikan	Tingkat capaikan target	Rencana realisasi capaian target (%)
				Realisasi target	Tahun 2021				
2.07.02	Pengadaan Kependidikan	Jumlah Pendapatan Kemendikbud atau Dinas Operasional lainnya	1 Unit	0	0	0%	1 Unit	1 Unit	100%
2.07.03	Pengadaan Mbeli	Jumlah Pendapatan masyarakat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	6 Unit	6 Unit	100%
2.07.04	Pengadaan Perlindungan	Jumlah Pendapatan perlindungan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	7 Unit	7 Unit	100%
2.07.05	Pengadaan Perlindungan Karakter	Jumlah Pendapatan perlindungan Karakter	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	3 Unit	3 Unit	100%
2.07.06	Pengadaan Perlindungan Masyarakat Lainnya	Jumlah Pendapatan perlindungan Masyarakat Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.07.07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Pendapatan sarana dan prasarana gedung Kantor atau Balai Pengadilan Lanjutnya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.07.08	Pengadaan Jasanya	Jumlah Pendapatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
2.08.01	Pengadaan Jasanya	Jumlah Pendapatan Surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.08.02	Pengadaan Jasanya	Jumlah Pendapatan Komunitas, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2.08.03	Pengadaan Jasanya	Jumlah kebutuhan pelaksanaan event daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%

Kode	Urusan/Bidang	Indikator kinerja	Target kinerja	Target realisasi capaian tahun 2021			Target realisasi capaian tahun 2022			Tingkat capaian realisasi target (%)	Rensstra OPD s/d tahun 2022
				Realisasi target program	Kegiatan hasil program dan kegiatan OPD	Tarif target kinerja	Realisasi target tahun 2021	Kegiatan hasil program dan kegiatan OPD	Tarif target kinerja		
2.08.01	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah penyediaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.08.02	Urusan/Kantor	Kebutuhan jasa	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.08.03	Urusan/Kantor	Kebutuhan Kantor,	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.08.04	Urusan/Kantor	Jumlah penyediaan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.09.01	Penyediaan Jasa Pemerintahan	Jumlah kenderaan dipelihara secara rutin	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.09.02	Penyediaan Kedinasan	Jumlah kendaraan dinas kerja dan dilengkapi dengan administrasi kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.09.03	Penyediaan Kedinasan	Jumlah kendaraan dinas kerja dan dilengkapi dengan administrasi kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.09.04	Penyediaan Kedinasan	Jumlah kendaraan dinas kerja dan dilengkapi dengan administrasi kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.09.05	Penyediaan Kedinasan	Jumlah kendaraan dinas kerja dan dilengkapi dengan administrasi kendaraan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	

Kode	Urusan/Bidang	Urusan/Program/Kegiatan	Target kinerja			Realisasi target kinerja			Realisasi target kinerja program dan kegiatan			Realisasi target kinerja dan Mesiin Latinnya		
			Perkiraan realisasi capaian target Rensstra OPD s/d tahun 2022	Tarif realisasi kinerja program dan kegiatan tahun 2021	Tarif realisasi target kinerja program dan kegiatan tahun 2021	Target kinerja	Realisasi kinerja	Realisasi capaian	Kegiatan hasil	Target Renja OPD	Realisasi Renja	Tarif kinerja	Realisasi	Tarif kinerja dan Mesiin Latinnya
2.09.01	2.09.06	Pemerintahan Peradilan	Jumlah peradilan dan mesin latinya	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	Kantor yang gedung kantor yang dipelihara dan bangunan lainnya	2 Unit	2 Unit	100%	100%	2.09.09
2.09.01	2.09.09	Pemerintahan Peradilan	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan bangunan lainnya	12 Bulan	2 Unit	12 Bulan	100%	2 Unit	Sarana dan Prasarana perekonomian yang dipelihara/dilindungi sebaiknya tidak berada dalam Balai Pengembangan Karakter dan bangunan lainnya yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	100%	100%	2.09.11
2.08.01	2.08.02	PROGRAM PENGRASUTAMAAN GENDER DAN MEMBERDAYAAN	Jumlah kota/kabupaten yang dilindungi dan bangunan lainnya	12 Bulan	10 Unit	12 Bulan	100%	10 Unit	Meningkatnya Presensiase pelindugan kota/kabupaten yang dilindungi dan bangunan lainnya	5%	5%	10%	100%	2.01
2.8.2	2.01	Pelembagaan	Presensiase pelindugan kota/kabupaten yang dilindungi dan bangunan lainnya	12 Bulan	25%	12 Bulan	25%	25%	Presensiase pelindugan kota/kabupaten yang dilindungi dan bangunan lainnya	25%	25%	50%	100%	2.02
2.08	2.02	Koordinasi dan Sinchronisa	Koordinasi dan sinchronisa pelaksanaan PUG	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	Koordinasi dan sinchronisa pelaksanaan PUG	12 Bulan	12 Bulan	100%	100%	2.01.02
2.08.02	2.01.03	Advokasi Kejadian dan Perdagangan	Advokasi Kejadian dan perdagangan	12 Bulan	33 Kelurahan	7 Kecamatan	100%	33 Kelurahan	Advokasi Kejadian dan perdagangan	100%	33 Kelurahan	100%	100%	2.01.03
2	08	02	2.01.03	Advokasi Kejadian dan Perdagangan	Advokasi Kejadian dan perdagangan	12 Bulan	100%	33 Kelurahan	Advokasi Kejadian dan perdagangan	100%	33 Kelurahan	100%	100%	

Kode	Urusan/Bidang	Realisasi target kinerja	Realisasi target kinerja hasil program/kegiatan/s	Indikator kinerja	Target kinerja	Tahun 2021	Target Renja OPD	OPD tahun 2021	Renjasai (R)	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi target kinerja dan program/kegiatan/s	Realisasi target kinerja hasil program/kegiatan/s	Realisasi target kinerja	Tahun 2022	Tingkat capaian target realisasi capaian target Rensstra (%)	Tingkat capaian target realisasi capaian target Rensstra (%)
2.02.02	2.01.04	Sosialisasi Kebijakan	Teraksanaanya	7 Kecamatan	2 Jelajahing	2 Jelajahing 2 masyarikat, 2 kecamatan	Pergrutuan tinggi, 7 Pergrutuan tinggi, 7	Pergrutuan tinggi, 7	masyarikat, 2 kecamatan	100%	2 Jelajahing 2 masyarikat, 2 kecamatan	Teraksanaanya	7 Kecamatan	100%	100%	100%
2.02.02	2.02	Pembelajaran Bidang	Teraksanaanya	7 Kecamatan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	Teraksanaanya	7 Kecamatan	100%	100%	100%
2.02.02	2.02.01	Sosialisasi Penitigkatan	Teraksanaanya	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	Teraksanaanya	7 Kecamatan	100%	100%	100%
2.02.02	2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pemimpinan	Teraksanaanya	7 Kecamatan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	Teraksanaanya	7 Kecamatan	100%	100%	100%
2.02.02	2.02.03	Advokasi Kebijakan dan Pemimpinan	Teraksanaanya	7 Kecamatan	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	Teraksanaanya	7 Kecamatan	100%	100%	100%
2.02.03	2.03	Penguratan dan Pengembangan	Teraksanaanya	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	Teraksanaanya	1 Kegiatan	100%	100%	100%
2.03	2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pemimpinan	Teraksanaanya	20 Lemaga	20 Lemaga	20 Lemaga	20 Lemaga	20 Lemaga	20 Lemaga	100%	20 Lemaga	Teraksanaanya	20 Lemaga	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang	Urusan/Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan	(RENCRA)	Tingkat	Realisasi (%)	Tingkat capaian realisasi target Rensstra (%)	
									Perkiraan realisasi capaian target Rensstra OPD s/d tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target Rensstra OPD s/d tahun 2022
2_08_02_2.03_02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Jumlah SDM yang mengalihfikirkan kelebihan kapasitas perolehan kinerja dan peningkatan kapasitas pelatihan manajemen organisasi Perempuan	50 orang	50 orang	100 orang	50 orang	100%	100%		
2_08_02_2.03_03	Pengembangan Komunitas dan Edukasi (KE)	Teknologi informasi dan edukasi untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi SDM dalam meningkatkan kinerja dan karantina har Kartini	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	100%	100%		
2_08_02_2.03_04	Peningkatan Kinerja dan Perindungan	Perbaikan kinerja dan perlindungan perempuan terhadap kekerasan dan kelakuan pelaku	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%	5 Kegiatan	100%	100%		
2_08_03_2.01_01	Koordinasi dan Sinergitas	Teknologi dan sinergitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terhadap kekerasan dan kelakuan pelaku	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	100%		
2_08_03_2.01_02	Advokasi Kejadian dan Pendampingan Layanan	Advokasi kejadian dan pendampingan layanan perempuan kepada perempuan yang dilakukan oleh kader dan pengajar	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	100%	100%		
2_08_03_2.01_03	Penyelesaian Kejadian dan Perlindungan	Penyelesaian kejadian dan perlindungan terhadap kekerasan dan kelakuan pelaku	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	100%		
2_08_03_2.01_04	Koordinasi dan Sinergitas	Koordinasi dan sinergitas koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terhadap kekerasan dan kelakuan pelaku	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	100%		
2_08_03_2.01_05	Penyelesaian Kejadian dan Perlindungan	Penyelesaian kejadian dan perlindungan terhadap kekerasan dan kelakuan pelaku	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	100%	100%		
2_08_03_2.01_06	Advokasi Kejadian dan Pendampingan Layanan	Advokasi kejadian dan pendampingan layanan perempuan kepada perempuan yang dilakukan oleh kader dan pengajar	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	100%	100%		

Kode	Urusan/Bidang	Indikator kinerja	Realisasi target kinerja	Target kinerja		Realisasi target program dan kegiatan	Rensstra OPD s/d tahun 2022	Tingkat capaian target	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
				Tanggal	Kegiatan				
2.02.01	Pembinaan Layanan	Tersedianya layanan	1 UPT PPA	1 UPT PPA	1 UPT PPA	100%	1 UPT PPA	1 UPT PPA	100%
2.02.02	Pembinaan Layanan	Rujukan Lanjutkan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Mengalihkan Koordinasi	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	30 Orang	30 Orang	100%
2.02.03	Pembinaan Layanan	Tersedianya layanan yang merujukkan Lanjutkan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Mengalihkan Koordinasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.02.04	Pembinaan Layanan	Koordinasi dan Sinkronisasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.03.01	Pengembangan Lemba	Terkasannya Lemba	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.03.02	Pengembangan Lemba	Terkasannya Lemba	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.03.03	Pengembangan Lemba	Terlaksananya Lemba	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
2.03.04	Advokasi Kelelahan dan Keterasaan	Terlaksananya advokasi kelelahan	5 Lemba	5 Lemba	5 Lemba	100%	5 Lemba	5 Lemba	100%

Kode	Urusan/Bidang	Indikator Kinerja	Target kinerja	Realisasi target kinerja	Target		Realisasi target kinerja OPD	OPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Tingkat capaian Rensstra (%)
					Realisasi kinerja	Realisasi target kinerja				
2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga	Jumlah peserta pelatihan kapasitas penyedia layanan	20 Orang	20 Orang	20 Orang	20 Orang	100%	20 Orang	100%	
2.03.03	Penyelenggaraan Kebutuhan Sosial Bagi Perempuan Kondisi Krisis	Terdedanya kebutuhan sosial bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	100%	
2.03.04	Penegulangan Jejaring antar Lembaga Penyeleksi Layanan Perindungan	Tereselenggaranya penyeleksiannya yang melibatkan lembaga penyedia layanan perindungan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	100%	
2.08.03	Penyelenggaraan Kebutuhan Sosial Bagi Perempuan Kondisi Krisis	Terdedanya kebutuhan sosial bagi perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus	12 kali	12 kali	12 kali	12 kali	100%	12 kali	100%	
2.08.04	Penegulangan Jejaring antar Lembaga Penyeleksi Layanan Perindungan	Tereselenggaranya penyeleksiannya yang melibatkan lembaga penyedia layanan perindungan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	100%	
2.08.05	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga di Kota Dumai	55%	55%	55%	55%	100%	60%	100%	

Kode	Urusan/Bidang	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target kinerja			Target	Realisasi target kinerja hasil program dan kegiatan			Realisasi dan s/d capaian kinerja hasil program dan kegiatan	Tingkat capaian target kinerja (%)	Tingkat capaian target realisasi (%)				
			Realisasi target tahun 2021				Realisasi target tahun 2022									
			Target Rena/Renja OPD	Tahun 2021	Renja 2022		Target Rena/Renja	Tahun 2022	Realisasi (Rena)							
2.8.4.2.01	Penugatan Kualitas Teraksesananya Pengembangan Layanan Perempuan dan Perlindungan Anak	Advokasi Kedudukan Anak	Perempuan untuk Keharmonisan Anak	100%	7 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	3 Kecamatan	0	100%	100%	100%				
2.08.04.2.01	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	Pengembangan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Keharmonisan Anak	100%	30 Orang	0	0	0	0	30 Orang	1 Kegiatan	100%				
2.08.04.2.02	Pelaksanaan Komunitas, Informasi dan Edukasi Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	100%	30 Orang	0	0	0	0	30 Orang	1 Kegiatan	100%				
2.08.04.2.03	Penyerbukan Kegiatan Masayarakat untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	Penyerbukan Kegiatan Masayarakat untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	Penyerbukan Kegiatan Masayarakat untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	100%	7 Kecamatan	0	0	0	0	7 Kecamatan	0	100%				
2.08.04.2.04	Pengembangan Lembaaga Pendampingan Layanan Perlindungan Anak	Teraksesananya Lembaaga Pendampingan Layanan Perlindungan Anak	Teraksesananya Lembaaga Pendampingan Layanan Perlindungan Anak	100%	7 Kecamatan	0	0	0	0	7 Kecamatan	0	100%				
2.08.04.2.05	Pengembangan Lembaaga Pendampingan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	100%	7 Kecamatan	0	0	0	0	7 Kecamatan	0	100%				
2.08.04.2.06	Pengembangan Lembaaga Pendampingan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	100%	7 Kecamatan	0	0	0	0	7 Kecamatan	0	100%				
2.08.04.2.07	Pengembangan Lembaaga Pendampingan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	100%	7 Kecamatan	0	0	0	0	7 Kecamatan	0	100%				
2.08.04.2.08	Pengembangan Lembaaga Pendampingan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	Penyuluhan untuk Kegiatan Kualitas Teraksesananya Sosialisasi Pengembangan Layanan Perlindungan Anak	100%	7 Kecamatan	0	0	0	0	7 Kecamatan	0	100%				

Kode	Urusan/Bidang	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi target		Target		Perkiraan realisasi capaian target Rensstra OPD s/d tahun 2022
					Realisasi program hasil kegiatan	Realisasi program	Target Realisasi (%)	Tingkat Realisasi (%)	
2.02.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan	Terkasannya pengembangan lembaga penyediaan perumahan	5 Kelurahan	0	0	0	5 Kelurahan	100%	
2.02.02	Pengembangan Kapsitas	Terkasannya pengembangan lembaga penyediaan perumahan	20 Orang	0	0	0	5 Kelurahan	100%	
2.02.03	Pengelolaan Jejaring antar Lembaran Penyediaan	Terkasannya pengembangan lembaga penyediaan perumahan	10 Kelurahan	0	0	0	10 Kelurahan	100%	
2.03	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya Permaataan Data Terpadu Gender dan Anak	20%	20%	20%	20%	100%	25%	100%
2.8.5	Penyampaikan Analisis dan Pengumpulan	Terkasannya Pengembangan Analisis dan Pengumpulan.	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
2.8.6	Penyampaikan Analisis dan Pengembangan	Terkasannya Pengembangan Analisis dan Pengembangan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
2.01	Penyampaikan Analisis dan Pengembangan	Terseminar Data dan Analisis	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%
2.01.01	Penyampaikan Analisis dan Pengembangan	Terdokumentasi anak di Kota dan Anak di Kewenangan dan Anak di Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target realisasi kinerja		Target realisasi kinerja		Target realisasi kinerja		Target realisasi kinerja		Target realisasi kinerja		Target realisasi kinerja		Target realisasi kinerja		Target realisasi kinerja		Target realisasi kinerja			
			Rencana	Bidang	Kinerja	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
2.05.02	Penyajian dan Pemanfaatan	Tersedianya media informasi gender dan keluarga terhadap permasalahan gender di Dumai	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	3 jenis	3 jenis	1 Dokumen	3 jenis	100%	1 Dokumen	3 jenis	1 Dokumen	3 jenis	100%	1 Dokumen	3 jenis	100%	1 Dokumen	3 jenis
2.06.02	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHAK)	Meningkatnya Capaian Kota Layak Anak	65%	65%	65%	100%	70%	70%	70%	70%	70%	100%	70%	70%	70%	70%	100%	70%	70%	70%	70%	100%
2.06.06	Advokasi Kebijakan dan Pedampangan Pemerintah	Jumlah lembaga pemenuhan non formal, dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak	75	75	75	100%	135	135	135	135	135	100%	135	135	135	135	100%	135	135	135	135	100%
2.06.08	Advokasi Kebijakan dan Pedampangan Pemerintah	Terselenggaranya pertemuan antar lembaga pemerintah dan dunia usaha yang Ramah Anak	30 Sekolah	30 Sekolah	30 Sekolah	100%	50 Organisasi	30 Lembaga	30 Lembaga	50 Organisasi	30 Lembaga	100%	50 Organisasi	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	50 Organisasi	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%
2.07.01	Advokasi Kebijakan dan Pedampangan Pemerintah	Terselenggaranya pertemuan antar lembaga pemerintah, dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak	30 Sekolah	30 Sekolah	30 Sekolah	100%	50 Organisasi	30 Lembaga	30 Lembaga	50 Organisasi	30 Lembaga	100%	50 Organisasi	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	50 Organisasi	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%
2.07.06	Pelembagaan PHA pada Kewenangan Pemerintah	Jumlah lembaga pemenuhan non formal, dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak	75	75	75	100%	135	135	135	135	135	100%	135	135	135	135	100%	135	135	135	135	100%
2.07.08	Advokasi Kebijakan dan Pedampangan Pemerintah	Terselenggaranya pertemuan antar lembaga pemerintah, dan dunia usaha yang berperan dalam pemenuhan hak anak	30 Sekolah	30 Sekolah	30 Sekolah	100%	50 Organisasi	30 Lembaga	30 Lembaga	50 Organisasi	30 Lembaga	100%	50 Organisasi	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%	50 Organisasi	30 Lembaga	30 Lembaga	30 Lembaga	100%
2.08.01	Koordinasi dan Sinergisasi	Teraksesnya dan sinergitas antar lembaga pemenuhan hak anak	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.08.06	Koordinasi dan Sinergisasi	Teraksesnya dan sinergitas antar lembaga pemenuhan hak anak	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.08.08	Koordinasi dan Sinergisasi	Teraksesnya dan sinergitas antar lembaga pemenuhan hak anak	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	
2.09.01	Perbaikan Layanan	Penyediaan dan pengembangan layanan perlindungan anak	18 Lembaaga	18 Lembaaga	18 Lembaaga	100%	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	100%	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	100%	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	100%	
2.09.06	Perbaikan Layanan	Penyediaan dan pengembangan layanan perlindungan anak	18 Lembaaga	18 Lembaaga	18 Lembaaga	100%	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	100%	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	100%	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	100%	
2.09.08	Perbaikan Layanan	Penyediaan dan pengembangan layanan perlindungan anak	18 Lembaaga	18 Lembaaga	18 Lembaaga	100%	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	100%	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	100%	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	20 Lembaaga	100%	

Kode	Urusan/Bidang	Target Kinerja		Realisasi target Kinerja	Indikator Kinerja		Realisasi program dan Kinerja Sumbu	Realisasi program dan Kinerja Subs		Tinjauan Kegiatan	Tinjauan Kegiatan Sumbu dan Kinerja Subs	Tinjauan Kegiatan Sumbu dan Kinerja Subs	Rensstra QPD s/d tahun 2022	Tinjauan Capaian target Rensstra (%)	
		Tarief target	Tarief target		OPD	Rencana program		OPD	Tarief target						
2.08.06	Penyediaan Layanan	Terselenggaranya Pelayanan Kinerja dan Pelaksanaan Pendampingan Sinkronisasi Koordinasi dan Sinkronisasi	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100% ^a	12 Bulan	100%	100%					
2.08.06	Peningembangan Komunitas, Informasi dan Edukasi Pemerintahan	Terselenggaranya Hak Pemerintahan dan Kinerja Pemerintahan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	330 Orang	40 Orang	30 Orang	100%				
2.08.06	2.02.03	Peningembangan Komunitas, Informasi dan Edukasi Pemerintahan	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	100%	330 Orang	40 Orang	30 Orang	100%				
2.08.06	2.02.04	Penyediaan Jasa/Hibah Anak	Terselenggaranya rapat Koordinasi/gugus tugas Kecamatan/Pemerintah	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	85 Orang	100%	85 Orang	7 Kecamatan	2 kali	100%			
2.08.06	2.02.06	Penyediaan Jasa/Hibah Anak	Terselenggaranya rapat Koordinasi/gugus tugas Kecamatan/Pemerintah	7 Kecamatan	7 Kecamatan	7 Kecamatan	85 Orang	100%	85 Orang	7 Kecamatan	2 kali	100%			
2.08.07	2.02.07	PERLINDUNGAN KHSUS	Meningkatnya perlindungan khusus anak	30%	30%	30%	100%	40%	40%	40%	100%				
2.08.08	2.02.08	PROGRAM ANAK	Kelulusan Arahan Anak	30%	30%	30%	100%	40%	40%	40%	100%				

Kode	Urusan/ Bidang	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi target	Tahun 2021	Tahun 2022	Target realisasi kinerja program dan kegiatan		Perkiraan realisasi capaian target Rensstra OPD s/d tahun 2022	Tingkat capaian Rensstra (%)
							Realisasi program	Kegiatan/ Sub capaian	Realisasi target	
2	7	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Rensstra	Realisasi target	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
2	08	07	2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Rensstra	90 Kasus	0	0%	90 Kasus	90 Kasus	100%
2	08	07	2.02	Koordinasi dan Sinergitas Teraksesanya dan Sinergitas Koordinasi	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 bulan	100%
2	08	07	2.02	Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Rensstra	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 bulan	100%
2	08	07	2.02	Koordinasi dan Sinergitas Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Rensstra	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 bulan	100%
2	08	07	2.02	Pengembangan Komunitas, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Rensstra	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%
2	08	07	2.02	Penuguanan Jejerling antar Lembaga Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Rensstra	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%
2	08	07	2.02	Perluasan Anak yang Memerlukan Perlindungan Rensstra	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%	7 Kecamatan	7 Kecamatan	100%
2	08	07	2.02	Perdagangan orang di kota/kabupaten/kota	30 Orang	30 Orang	100%	30 Oorang	30 Oorang	100%

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator kinerja capaian program/ kegiatan kegiatan hasil program/kegiatan s/d tahun 2022	Target realisasi kegiatan s/d target Rensstra (%) realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022	Taruhan 2021		Realisasi target kinerja capaian program/ kegiatan kegiatan hasil program/kegiatan s/d target Rensstra (%) realisasi capaian target Renstra s/d tahun 2022	
				Realisasi target kinerja capaian program/ kegiatan kegiatan hasil program/kegiatan s/d target Rensstra (%) realisasi capaian target Rensstra s/d tahun 2022	Realisasi target kinerja capaian program/ kegiatan kegiatan hasil program/kegiatan s/d target Rensstra (%) realisasi capaian target Rensstra s/d tahun 2022		
2_03	Pengembangan Lembaga Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2_03	Kordinasi dan Sinergiositas Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2_03	Kordinasi dan Sinergiositas Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2_03	Kordinasi dan Sinergiositas Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2_03	Kordinasi dan Sinergiositas Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2_03	Kordinasi dan Sinergiositas Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2_03	Kordinasi dan Sinergiositas Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2_03	Kordinasi dan Sinergiositas Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2_03	Kordinasi dan Sinergiositas Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2_03	Kordinasi dan Sinergiositas Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
2_03	Kordinasi dan Sinergiositas Parawita Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kabupaten/Kota	Telahkananya pendidikan dan sinergiositas sumberdaya dan kelembagaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus Kabupaten/Kota	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%

PERPLATAN DINAS PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PELINDUGAN ANAK
MANI ASNA SKM, M. SI

Dumai, 02 Februari 2022



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

Indikator kinerja Dinas PPPA Kota Dumai merujuk pada Bab VIII Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2021-2026. Adapun indikator kinerja Dinas PPPA Kota Dumai Tahun 2022 sesuai RPJMD 2021 – 2026 sebagai berikut :

- A. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar. Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program :
- 1) Program perlindungan perempuan yang terdiri dari:
 - a) Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen.
 - b) Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten/ kota. dengan target 40 layanan dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/ kota dengan target 40 layanan.
 - c) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:

- Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan melalui satuan tugas perlindungan perempuan dan satuan tugas tindak pidana perdagangan orang dengan target 7 kecamatan dan terselenggaranya penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan perempuan melalui satuan tugas tindak pidana perdagangan orang dengan target 7 kecamatan.
- 2) Program perlindungan khusus anak terdiri dari:
 - a) Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/ kota dengan target 3 dokumen.
 - b) Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dengan target 21 kasus.
 - c) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota dengan target 5 dokumen.

B. Skor Pencapaian Kota Layak Anak

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program :

- 1) Program pemenuhan hak anak terdiri dari:
 - a) Kegiatan pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
 - Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya penguatan informasi layak anak (ILA) dengan target 25 orang dan terselenggaranya lembaga yang ramah anak dengan target 20 lembaga.
 - b) Kegiatan penguatan dan pengembangan penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya pelayanan pusat pembelajaran keluarga dengan target 15 kali dan terselenggaranya peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak layanan peningkatan kualitas hidup anak melalui forum anak dengan target 18 forum anak.
 - Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi pemenuhan hak anak bagi lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya replikasi dan pembinaan PATBM dengan target 40 orang.
 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu terselenggaranya rapat koordinasi gugus tugas kota layak anak dengan target 65 orang dan terselenggaranya rapat pencapaian implementasi kecamatan layak anak dengan target 7 kecamatan

C. Skor Pencapaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE)

Keberhasilan indikator kinerja tersebut didukung oleh terlaksananya program :

- 1) Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan terdiri dari:
 - a) Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:

- Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/kota dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan kabupaten/ kota dengan target 12 bulan.
- Advokasi kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG dengan indicator keluaran yaitu persentase pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG diseluruh perangkat daerah dengan target 100%, serta terlaksananya pendampingan PUG termasuk PPRG tingkat kelurahan dengan target 7 kelurahan.
 - a) Kegiatan pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
 - Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik dan ekonomi dengan target 7 kecamatan.
 - b) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan target 2 kegiatan.
 - c) Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
 - Pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu terlaksananya pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan target 2 kegiatan.
- 2) Program pengelolaan sistem data gender dan anak terdiri dari:
 - a) Kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/ kota dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan data gender dan anak di kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu tersedianya data informasi anak di kota Dumai gender dan anak di kota Dumai dengan target 1 dokumen, tersedianya data gender di kota Dumai.
 - Penyajian dan pemanfaatan data gender dan anak dalam kelembagaan data di kewenangan kabupaten/ kota dengan indikator keluaran yaitu

tersedianya media informasi gender dan anak dengan target 1 jenis media, tersusunnya profil anak dalam kelembagaan data di kota dumai dengan target 1 dokumen, serta tersusunnya profil gender dalam kelembagaan data di Kota Dumai dengan target 1 dokumen.

Hasil analisis kinerja Pelayanan SKPD disajikan dalam tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Dinas PPPA Kota Dumai seperti tersebut dibawah ini :

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKR	Pencaapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Dumai								
				Target Rensstra OPD	Realisasi Capaian	Proyeksi	2021	2022	2023	2024	Catatan Analisa	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Pemberangunan Gender			87	87	88	90	90,52		89	90	
2	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan yang memadai dan korban kekerasan yang mendapatkan perlindungan yang memadai sesuai standar			80	85	90	91	82,76	92,8	90	91	
3	Presentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPo			0,100	0,095	0,090	0,085	0,02	0,03	0,090	0,085	
4	Presentase Partisipasi angkatan kerja perempuan			53,05	54,01	54,85	55,01	54,85		54,85	55,01	
5	Capaian Kota Layak Anak (KLA)			Madya	Nindya	Nindya	Nindya	Madya	Madya	Nindya	Nindya	

Pencaapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Table T-C.30

2.3 ISU-PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

Gambaran mengenai pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Dumai sebesar 90,82. IPG Kota Dumai menunjukkan perkembangan yang bagus, dengan realisasi kinerja sampai tahun 2020 mengalami peningkatan dari target yang ditetapkan yaitu dari 89 menjadi 90,86 (melebihi target yang ditetapkan). Salah satu indikator penting dalam pengukuran IPG adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan elemen kunci yang sering dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, bersama angka kesakitan,Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematiian Bayi (AKB).

B. Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total jumlah perempuan usia kerja.Target dari indikator sasaran ini yaitu 53,05 % dengan realisasi capaian pada tahun 2019 sebesar 54,85% atau sebanyak 11.918 jiwa perempuan yang bekerja dari 22.867 jiwa penduduk perempuan usia kerja. Dengan demikian pencapaian target kinerja tersebut sebesar 52,12% dan menurun pada tahun 2020 menjadi 52,02% dari target kinerja 54,85% yang bermakna bahanwa dari 105.564 jiwa Angkatan kerja perempuan, terdapat sebanyak 54,915 jiwa perempuan yang bekerja (masih dibawah target yang ditetapkan).

C.Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Sesuai Standar.

Persentase cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sesuai standar mengalami peningkatan dibanding tahun

sebelumnya yaitu 82,76% pada tahun 2019 menjadi 93,80% dan mengalami peningkatan sebesar 2,54% pada tahun 2020, dimana jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak di Kota Dumai tahun 2020 tercatat 121 kasus dan 82 korban kekerasan pada perempuan dan anak. Dari jumlah korban diatas dilaporkan 79 korban yang telah mendapatkan penanganan sesuai standar atau sebesar 96,3% (melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 90%).

D. Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO.

Pada tahun 2019 Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO di Kota Dumai sebesar 0,051% dari 0,095% target yang ditetapkan. Capaian ini mengalami penurunan pada tahun 2020 yaitu dari 146.963 liwa penduduk perempuan Kota Dumai ditemukan sebanyak 16 kasus perempuan korban kekerasan termasuk TPPO atau sebesar 0,01%, (dibawah target yang ditetapkan yaitu 0,09%) yang berarti semakin rendahnya kasus yang ditemukan maka semakin baik capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan karena telah berfungisinya Unit Pelaksanaan teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) sebagai salah satu wadah perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Dumai.

E. Capaian Kota Layak Anak (KLA)

Pada Tahun 2019 capaian Kota Layak Anak untuk Kota Dumai masih dalam predikat Madya (2) dan pada tahun 2020 capaian kota layak anak masih berada pada predikat Madya (2) atau sebesar 66,7% dari target yang harus dicapai pada tahun 2020 yaitu predikat Nindya (3) atau belum mencapai target. Salah satu yang menjadi criteria penting dalam penilaian kota layak anak adalah adanya data terpilih gender dan anak sebagai input analisis gender dan pemenuhan hak anak yang bermanfaat untuk perencanaan pembangunan yang responsive gender, namun belum semua Perangkat Daerah di kota Dumai memiliki data terpilih gender dan anak sehingga penginputan analisis gender belum bias dilaksanakan secara optimal. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlidungan Anak Kota Dumai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

1) Belum optimalnya kualitas pelayanan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

2) Belum optimalnya pelaksanaan program kegiatan pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak seperti kegiatan pemberdayaan perempuan, pencegahan serta penanganan kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dalam pelaksanaannya membutuhkan tenaga – tenaga ahli dan profesional dibidangnya seperti Psikolog, Psikiater, serta tenaga ahli lainnya.

3) Belum optimalnya penyelenggaraan hak-hak anak sebagaimana ketentuan yang terkandung dalam UU perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014;

4) Belum optimalnya pendataan gender dan anak di Kota Dumai yang disebabkan karena belum semua Organisasi Perangkat Daerah terkait menggunakan sistem data terpilih.

a. Hambatan yang dihadapi

Terbatasnya anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sehingga belum semua program –program kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada pencapaian Visi Kota Dumai yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri Yang Unggul dan Bertumpu pada Budaya Melayu”** dan Misi ke-2 **“Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Melayu.”**

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Walikota Dumai, terhadap Capaian Program Nasional/ Internasional

Unsur Visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing yang mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif untuk memacu pelaksanaan pembangunan Nasional.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung pencapaian Misi ke -2 Pemerintah

Kota Dumai yaitu “**Mewujudkan Sumber daya Manusia yang Berkualitas dan Berjati Melayu.**”

Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah meningkatnya kualitas pembangunan gender, dengan sasaran yaitu meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak anak.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas PPPA

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas PPPA Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- 2) Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- 3) Pengungkapan kasus-kasus kekerasan termasuk TPPPO terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- 4) Adanya kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan, dan menjamin kelangsungan hidup dalam pemenuhan hak anak.

b. Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- 2) UU 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota sehingga memudahkan pencapaian target Nasional maupun target Pemerintah Daerah dalam pembangunan responsif gender,
- 3) Tujuan Pembangunan Berkelaanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga PBB dan atau

lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.

4) Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelaanjutan (SDG's).

5) Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus perempuan dan anak.

6) Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.

7) Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

5. Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun yang direncanakan.

Adapun rekomendasi dan strategis dilakukan dalam merumuskan program dan kegiatan :

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah, meningkatkan partisipasi perempuan untuk menjadi anggota legislatif, mengadvokasi pimpinan Partai Politik untuk menempatkan perempuan sebagai calon legislatif, fasilitasi pembentukan *gender champion*, pemberian pelatihan keterampilan bantuan alat bagi kelompok rentan, meningkatkan kapasitas perencanaan dalam PPRG, meningkatkan cakupan ARG dalam APBD dan memperkuat kelembagaan PUG serta pemanfaatan data terpilih.
- b. Memperkuat kerjasama antara Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPO, melalui :
 - 1) Penguatan regulasi dalam penanganan kasus termasuk penegakan hukum

- yang berkeadilan,
- 2) Koordinasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan perangkat daerah,
 - 3) Peningkatan pemahaman Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPPO,
 - 4) Pemulihian korban reintegrasi sosial,
 - 5) Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan penaganan korban,
 - 6) Fasilitasi penyediaan bantuan hukum bagi yang membutuhkan.
- c. Mempercepat capaian peringkat Kota Layak Anak melalui :
- 1) Pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak,
 - 2) Penguatan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pencapaian Kota Layak Anak .
 - 3) Peningkatan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
 - 4) Advokasi kepada Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksplorasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
 - 5) Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak dalam pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di Kota Dumai.
- d. Meningkatkan perlindungan anak berkebutuhan khusus melalui harmonisasi berbagai kebijakan perlindungan khusus anak, memperkuat lembaga/jejaring pemenuhan hak anak di Kota Dumai untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak, menguatkan kapasitas anak berkebutuhan khusus, menyediakan sarana dan prasarana penunjang, serta memperkuat keberdayaan anak berkebutuhan khusus agar setara dengan anak-anak lainnya.
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperkuat implementasi PUG melalui workshop perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang, pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat kota, memperkuat lembaga/jejaring PUG di Kota Dumai untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG dan

memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data gender dan anak.

- f. Meningkatkan kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan regulasi dan perbaikan layanan penunjang tugas dan fungsi.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan dalam tabel T-C.31 berikut ini :

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Target	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan (Rp)	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Target	Kegiatan	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan	(1)
												(12)
	Urusan Pemerintah	Kota	Urusan Pemerintah	6.505.333.521,00	Urusan Pemerintah	Kota	Presentase Penunjangan	Perangkat daerah	Presentase	6.505.333.521,00		
	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Dumai	Perilindungan dan Pembudayaan	6.505.333.521,00	Perilindungan dan Pembudayaan	Dumai	Perilindungan dan Pembudayaan	Perangkat daerah	Presentase	5.619.696.656		
	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Kota	Presentase Penunjangan	100%	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH	Kota	Presentase Penunjangan	Perangkat daerah	Presentase	5.619.696.656		
	PENGANGGARAN, dan PERENCANAAN	Dumai	a. Jumlah dokumen perencanaan	67.351.000	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota	a. Jumlah dokumen perencanaan	Perangkat daerah	Presentase	67.351.000		
	Perencanaan Dokumen	Kota	Jumlah dokumen	19.702.500	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA	Kota Dumai	Jumlah dokumen	Perangkat daerah	Presentase	19.702.500		
	Perencanaan Dokumen	Dumai	3 Dokumen	19.702.500	PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA	Dokumentasi	3 Dokumen	Perangkat daerah	Presentase	19.702.500		
	Koordinasi dan Dokumen	Kota	Jumlah dokumen RKA-	8.749.800	Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen RKA-	SKPD	Presentase	8.749.800		
	Koordinasi dan Dokumen	Dumai	2 Dokumen	4.048.600	Koordinasi dan Dokumen RKA-SKPD	Dokumentasi	2 Dokumen	Perangkat daerah	Presentase	4.048.600		
	Penyusunan Dokumen	Kota	Jumlah dokumen DPA-	4.056.900	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen DPA-	SKPD	Presentase	4.056.900		
	Koordinasi dan Dokumen	Dumai	2 Dokumen	4.056.900	Koordinasi dan Dokumen DPA-SKPD	Dokumentasi	2 Dokumen	Perangkat daerah	Presentase	4.056.900		

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Capaian	Kebutuhan Dana	(Rp)	Sub Kegiatan	Catatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan laporan hasil realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan laporan hasil realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	19.194.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD	19.194.800		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumen perbaikan dan laporan hasil realisasi penyelesaian kinerja dan laporan hasil realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokument perbaikan dan laporan hasil realisasi penyelesaian kinerja dan laporan hasil realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	2.970.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.970.700		
Koordinasi dan Perbaikan Dokumen DPA-SKPD	Kota Dumai	Jumlah dokumenter dan laporan hasil realisasi penyelesaian kinerja dan laporan hasil realisasi kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan dokument perbaikan dan laporan hasil realisasi penyelesaian kinerja dan laporan hasil realisasi kinerja SKPD	2 Dokumen	2.970.700	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.970.700		
Koordinasi dan Penyelenggaraan ASN	Kota Dumai	Jumlah rang yang turut serta dalam menggalat ASN	Penyelenggaraan ASN	14 Bulan	4.025.873.296	Koordinasi dan Penyelenggaraan ASN	4.025.873.296		
Penyelidikan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Dumai	Jumlah rang yang turut serta dalam menggalat ASN	Penyelenggaraan ASN	14 Bulan	4.025.873.296	Penyelidikan Gaji dan Tunjangan ASN	4.025.873.296		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Dumai	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	10.999.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.999.700		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Koordinasi	Kota Dumai	Jumlah laporan Keuangan Sistem Koordinasi	Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Koordinasi	2 Laporan	10.999.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem Koordinasi	10.999.700		
Admistrasi barang milik daerah pada administrasi barang milik daerah	Kota Dumai	Terakasnanya administrasi barang milik daerah pada administrasi barang milik daerah	Admistrasi barang milik daerah pada administrasi barang milik daerah	100%	29.992.600	Admistrasi barang milik daerah pada administrasi barang milik daerah	29.992.600		
Penatausahaan barang milik daerah pada administrasi barang milik daerah	Kota Dumai	Jumlah laporan barang milik daerah pada administrasi barang milik daerah	Penatausahaan barang milik daerah pada administrasi barang milik daerah	2 Laporan	29.992.600	Penatausahaan barang milik daerah pada administrasi barang milik daerah	29.992.600		

No	Catatan Penitig	Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Admisionaris Perangkat Daerah	Kota Dumai	2. Presentase peningkatan disiplin	100%	75.550.080	Admisionaris Perangkat Daerah	Kota Dumai	Presentase pengadaan pakaian dina	63 Paket	63.550.080
		Kependidikan dan Pengembangan Teknologi	Kota Dumai	Jumlah pegawai	1 Orang	5.500.000	Pendidikan dan Pengembangan Teknologi	Kota Dumai	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pelatihan dan fungsi	1 Orang	6.500.000
		Administrasi Umum	Kota Dumai	Tersedianya kebutuhan administrasi umum	100%	342.783.201	Admisionaris Perangkat Daerah	Kota Dumai	Administrasi kebutuhan administrasi umum	100%	342.783.201
		Perangkat Daerah	Kota Dumai	Tersedianya kebutuhan administrasi umum	100%	342.783.201	Admisionaris Perangkat Daerah	Kota Dumai	Administrasi kebutuhan administrasi umum	100%	342.783.201
		Penyediaan Komponen Infrastruktur dan Penerangan	Kota Dumai	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	1 Paket	8.590.300	Penyediaan Komponen Infrastruktur dan Penerangan	Kota Dumai	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan	1 Paket	8.590.300
		Penyediaan Peralatan Kantor	Kota Dumai	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	73.925.001	Penyediaan Peralatan Kantor	Kota Dumai	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 Paket	73.925.001
		Penyediaan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah paket perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	14.994.400	Penyediaan Perlengkapan Kantor	Kota Dumai	Jumlah paket perlengkapan kantor yang disediakan	1 Paket	14.994.400
		rumah tangga	Kota Dumai	Jumlah paket perlengkapan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	14.994.400	Penyediaan Perlengkapan rumah tangga	Kota Dumai	Jumlah paket perlengkapan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	14.994.400
		Penyediaan Peralatan	Kota Dumai	Jumlah paket perlengkapan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	73.285.900	Penyediaan Peralatan	Kota Dumai	Jumlah paket perlengkapan rumah tangga yang disediakan	3 Paket	38.285.900
		Penyediaan Bahan Logistik	Kota Dumai	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	38.285.900	Penyediaan Bahan Logistik	Kota Dumai	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3 Paket	38.285.900
		Penyediaan barang	Kota Dumai	Jumlah paket barang yang disediakan	3 Paket	34.999.800	Penyediaan barang	Kota Dumai	Jumlah paket barang yang disediakan	3 Paket	34.999.800

No	Catatan	Program / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kegiatan / Sub Capaian	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Cara	
					1 Dokumen	8.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan yang berlakuan		1 Dokumen	Kota Dumat Jumlah paket mebel yang disediakan	14 Unit	Pengadaan mebel	
Pengelenggaran Rapat	Kota Dumat	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	163.587.800	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 Laporan	Kota Dumat Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Dumat	Terselemaniya barang milik daerah penunjang Ursan pemerintah daerah	122.757.940	122.757.940	Pengadaan Barang	Milik Daerah Penunjang Ursan pemerintah daerah
Penyelenggaran Rapat	Kota Dumat	Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan	163.587.800	Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	55 Laporan	Kota Dumat Penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Dumat	Terselemaniya barang milik daerah penunjang Ursan pemerintah daerah	122.757.940	122.757.940	Pengadaan Barang	Milik Daerah Penunjang Ursan pemerintah daerah
Pengadaan Paket mebel	Kota Dumat	dan mesin lainnya	5 Unit	64.554.600	Pengadaan paket mebel	Kota Dumat Jumlah paket mebel yang disediakan	Kota Dumat dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Dumat	Terselemaniya barang milik daerah penunjang Ursan pemerintah daerah	30.723.340	30.723.340	Pengadaan Sarana dan Prasarana	Prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kota Dumat	dan mesin lainnya	10 Unit	30.723.340	Pengadaan sarana	Kota Dumat Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Dumat dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Dumat	Terselemaniya jasa penunjang Ursan pemerintah daerah	818.164.000	818.164.000	Penyediaan Jasa	Penunjang Ursan pemerintah daerah
Pengadaan Jasa	Kota Dumat	lainnya	100%	818.164.000	Penyediaan jasa	Kota Dumat Penunjang Ursan pemerintah daerah	Kota Dumat Penunjang Ursan pemerintah daerah	Kota Dumat	Terselemaniya jasa penunjang Ursan pemerintah daerah	174.000	174.000	Penyediaan Jasa Surat	menyurat
Penyediaan Jasa Surat	Kota Dumat	1 laporan	174.000	Penyediaan jasa surat	Kota Dumat Jumlah laporan	1 laporan	Kota Dumat Penyediaan jasa surat	Kota Dumat	Penyediaan jasa surat	100.450.000	100.450.000	Penyediaan Jasa	Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa	Kota Dumat	36 Laporan	100.450.000	Penyediaan jasa	Kota Dumat Jumlah laporan	36 Laporan	Kota Dumat Penyediaan jasa	Kota Dumat	Penyediaan jasa	36 Laporan	100.450.000	Penyediaan Jasa	Komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa	Kota Dumat	1 laporan	13.740.000	Penyediaan jasa	Kota Dumat Penyediaan dan perbaikan kantor	1 laporan	Kota Dumat Penyediaan dan perbaikan kantor	Kota Dumat	Penyediaan jasa	13.740.000	13.740.000	Penyediaan Jasa	Penyediaan dan perbaikan kantor
Penyediaan Jasa	Kota Dumat	1 laporan	13.740.000	Penyediaan jasa	Kota Dumat Penyediaan dan perbaikan kantor	1 laporan	Kota Dumat Penyediaan dan perbaikan kantor	Kota Dumat	Penyediaan jasa	13.740.000	13.740.000	Penyediaan Jasa	Penyediaan dan perbaikan kantor
Penyediaan Jasa	Kota Dumat	72 Laporan	703.800.000	Penyediaan jasa	Kota Dumat Jumlah laporan	72 Laporan	Kota Dumat Penyediaan umum	Kota Dumat	Penyediaan yang disediakan	703.800.000	703.800.000	Penyediaan Jasa	Penyediaan umum kantor Dumai

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan	Penyediaan Jasas Pemerintahan dan pajak								Penyediaan Jasas Pemerintahan dan pajak																																				
								Pemelibaran jasa pemerintahan dan pajak	Kota Dumat	Jumlah Kenderaan atau perorangan dan pajak	4 Unit	38.530.000	Penyediaan jasa pemerintahan dan pajak	Kota Dumat	Jumlah Kenderaan jasa	1 unit	38.530.000	Pemelibaran jasa pemerintahan, biaya kendaraan, kenderaan jasa	Kota Dumat	Jumlah Kenderaan atau kenderaan jasa	4 Unit	68.221.000	Pemelibaran jasa pemerintahan, biaya kendaraan, kenderaan jasa	Kota Dumat	Jumlah kenderaan dan mesin yang dipelihara	1 unit	7.083.839	Pemelibaran/rehabilitasi	Si sarana dan prasarana pendukung gedung lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung	11 Unit	6.710.000	PROGRAM PENGAURUSTAMAN GENDER DAN MEMBERDAYAAN	Kota Dumat	Presentase ARG di	10%	309.801.900	PEREMPUAN GENDER DAN MEMBERDAYAAN	Kota Dumat	Presentase ARG di	10%	309.801.900	PEREMPUAN GENDER DAN MEMBERDAYAAN	Kota Dumat	Presentase ARG di	50%	95.657.200	PELEMBAGAN PENGAURUSTAMAN GENDER (PUG) pada Lembaaga Kewenangan gender (PUG) di kelurahan	Kabupaten / Kota	Presentase pelembagan penGAURUSTAMAN gender (PUG)	50%	95.657.200
	Pemelibaran Barang Milik Daerah	Kota Dumat	Tepeliharanya barang milik daerah	100%	126.224.839	Pemelibaran barang milik daerah	Kota Dumat	Tepeliharanya barang milik daerah	Dareah	Barang Milik Daerah	1	38.530.000	Penyediaan jasa	Kota Dumat	Jumlah Kenderaan jasa	1 unit	38.530.000	Penyediaan jasa pemerintahan dan pajak	Kota Dumat	Jumlah Kenderaan atau kenderaan jasa	4 Unit	68.221.000	Pemelibaran jasa pemerintahan, biaya kendaraan, kenderaan jasa	Kota Dumat	Jumlah kenderaan dan mesin yang dipelihara	1 unit	7.083.839	Pemelibaran/rehabilitasi	Si sarana dan prasarana pendukung gedung lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung	11 Unit	6.710.000	PROGRAM PENGAURUSTAMAN GENDER DAN MEMBERDAYAAN	Kota Dumat	Presentase ARG di	10%	309.801.900	PEREMPUAN GENDER DAN MEMBERDAYAAN	Kota Dumat	Presentase ARG di	10%	309.801.900	PEREMPUAN GENDER DAN MEMBERDAYAAN	Kota Dumat	Presentase ARG di	50%	95.657.200	PELEMBAGAN PENGAURUSTAMAN GENDER (PUG) pada Lembaaga Kewenangan gender (PUG) di kelurahan	Kabupaten / Kota	Presentase pelembagan penGAURUSTAMAN gender (PUG)	50%	95.657.200
	Pemelibaran Kegiatan Sosial	Lokasi	Indikator	Target	Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan	Pemelibaran Barang Milik Daerah	Kota Dumat	Penunjangan Nursan Daresah	1	126.224.839	Pemelibaran barang milik daerah	Kota Dumat	Tepeliharanya barang milik daerah	100%	126.224.839	Pemelibaran jasa	Kota Dumat	Jumlah Kenderaan jasa	1 unit	38.530.000	Penyediaan jasa pemerintahan dan pajak	Kota Dumat	Jumlah Kenderaan dan mesin yang dipelihara	1 unit	7.083.839	Pemelibaran/rehabilitasi	Si sarana dan prasarana pendukung gedung lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung	11 Unit	6.710.000	PROGRAM PENGAURUSTAMAN GENDER DAN MEMBERDAYAAN	Kota Dumat	Presentase ARG di	10%	309.801.900	PEREMPUAN GENDER DAN MEMBERDAYAAN	Kota Dumat	Presentase ARG di	10%	309.801.900	PEREMPUAN GENDER DAN MEMBERDAYAAN	Kota Dumat	Presentase ARG di	50%	95.657.200	PELEMBAGAN PENGAURUSTAMAN GENDER (PUG) pada Lembaaga Kewenangan gender (PUG) di kelurahan	Kabupaten / Kota	Presentase pelembagan penGAURUSTAMAN gender (PUG)	50%	95.657.200

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (Rp)	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (Rp)	Kebutuhan Dana	Cara kerja Penenting			
	Advokasi Kebijakan dan pendampingan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	12.044.400	Advokasi Kebijakan dan pendampingan	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	1 dokument	12.044.400	Advokasi Kebijakan dan pendampingan	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	37	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG
	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	20.956.700	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	37	20.956.700	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	37	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG
	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	20.956.700	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	37	20.956.700	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	37	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG
	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	20.956.700	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	37	20.956.700	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	37	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG
	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	20.956.700	Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG	Kota Dumai	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	37	20.956.700	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG	Jumlah Perangkat daerah yang mengikuti pelaksanaan kebijakan	37	Sosialisasi Kebijakan pelaksanaan PUG
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Kota Dumai	Terkasannyaaya pemerdayan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100.824.800	Pembinaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Kota Dumai	Terkasannyaaya pemerdayan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	7	100.824.800	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Terkasannyaaya pemerdayan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	7	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Kota Dumai	Terkasannyaaya pemerdayan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	100.824.800	Pembinaan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Kota Dumai	Terkasannyaaya pemerdayan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	7	100.824.800	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	Terkasannyaaya pemerdayan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	7	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi

No	Program / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kegiatan / Sub Capaian (Rp)	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Kegiatan	Capaian (Rp)	Kebutuhan Dana	Cataatan Penetring	Sosialisasi Peningkatan partisipasi pemenuhan hakum, sosial dan ekonomi	
											Kota Dumai	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan		Yang mendukung advokasi dan pendampingan yang mendukung organisasi	3.562.200	Advokasi kebijakan dan pendampingan	Yang mendukung advokasi dan pendampingan yang mendukung organisasi	12 organisasi	3.562.200	Advokasi kebijakan dan pendampingan	Yang mendukung advokasi dan pendampingan yang mendukung organisasi	Kota Dumai	
	Penguratan dan pembangunan	Layanan	Terkasannya layanan penguratan dan pembangunan	113.319.900	Kota Dumai	Terkasannya layanan penguratan dan pembangunan	1 Kegiatan	113.319.900	Kota Dumai	Terkasannya layanan penguratan dan pembangunan	Layanan	Kota Dumai
	Pengembangan dan penyediaan layanan	Layanan	Terakasannya layanan penguratan dan pembangunan	11.322.300	Kota Dumai	Terakasannya layanan penguratan dan pembangunan	25 Orang	11.322.300	Kota Dumai	Terakasannya layanan penguratan dan pembangunan	Layanan	Kota Dumai
	Perangkat pelaksana	Dumai	Jumlah sumber daya lembaga penyediaan	11.322.300	Kota Dumai	Jumlah sumber daya lembaga penyediaan	25 Orang	11.322.300	Kota Dumai	Jumlah sumber daya lembaga penyediaan	Layanan	Kota Dumai
	Pengembangan dan penyediaan layanan	Dumai	Jumlah sumber daya lembaga penyediaan	101.997.600	Kota Dumai	Jumlah dokumen komunikasi informasi edukasi (KIE)	3 Dokumen	101.997.600	Kota Dumai	Jumlah dokumen komunikasi informasi edukasi (KIE)	Kota Dumai	Kota Dumai
	Pengembangan dan penyediaan layanan	Dumai	Kota Dumai	101.997.600	Kota Dumai	Informasi edukasi (KIE)	3 Dokumen	101.997.600	Kota Dumai	Informasi edukasi (KIE)	Kota Dumai	Kota Dumai
	PERLINDUNGAN	PERLINDUNGAN	PERLINDUNGAN	86.967.800	PERLINDUNGAN	PERLINDUNGAN	20%	86.967.800	PERLINDUNGAN	PERLINDUNGAN	PERLINDUNGAN	PERLINDUNGAN

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Lokasi	Kegiatan / Sub Kegiatan	Program/ Capaian (Rp)	Indikator	Target	Capaian (Rp)	Kebutuhan Dana	Catatan Penetring	
	Pengembangan terhadap lingkup	Dumai	Perempuan terhadap lingkup	15.860.000	Perempuan terhadap lingkup	Perempuan terhadap lingkup	Perempuan terhadap lingkup	Deerah	Perempuan terhadap lingkup	Perempuan terhadap lingkup	Dumai	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan	1.000.000
	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan	Dumai	Jumlah dokumen hasil	1.000.000	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan	Jumlah dokumen hasil	1.000.000	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan	1.000.000	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan	Dumai	Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan	1.000.000
	Advokasi kebijakan dan pernindungan layanan	Dumai	Jumlah Perangkat dearah yang mendukung advokasi kebijakan dan pernindungan	14.860.000	Advokasi kebijakan dan pernindungan	Jumlah Perangkat dearah yang mendukung advokasi kebijakan dan pernindungan	14.860.000	Advokasi kebijakan dan pernindungan	14.860.000	Advokasi kebijakan dan pernindungan	Dumai	Jumlah Perangkat dearah yang mendukung advokasi kebijakan dan pernindungan	14.860.000
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekelepasan Yang Memerlukan Layanan	Dumai	1 UPT PPA	29.999.800	Terseidainya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekelepasan yang memerlukan layanan	Layanan Rujukan Lanjutan bagi perempuan korban kekelepasan yang memerlukan layanan	1 UPT PPA	Terseidainya layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekelepasan yang memerlukan layanan	29.999.800	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekelepasan Yang Memerlukan Layanan	Dumai	1 UPT PPA	29.999.800
	Kooperasi Kabupaten/Kota	Dumai	30 Orang	29.999.800	Jumlah Perempuan korban kekelepasan yang mendukung advokasi kebijakan dan pernindungan	Kooperasi Kabupaten/Kota yang mendukung advokasi kebijakan dan pernindungan	30 Orang	Jumlah Perempuan korban kekelepasan yang mendukung advokasi kebijakan dan pernindungan	29.999.800	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekelepasan Yang Memerlukan Layanan	Dumai	30 Orang	29.999.800

No	Catatan Penitng	Pengeluaran dan Pengembangan Kegiatan /Sub Kegiatan									
		Lokasi	Inidikator Target	Pagu Indikatif	Kegiatan /Sub Capaian	Indikator Target	Kinerja Capaian	Tarief	Kebutuhan Dana	Capaian (Rp)	Kebutuhan Dana (Rp)
	Pengeluaran dan Pengembangan Kegiatan /Sub Kegiatan	Kota Dumai	Terakasnanya Pengeluaran dan Pengembangan	12 Bulan	41.108.000	Pengeluaran dan Pengembangan Lembaaga Penyediaan Layanan	Pengeluaran dan Lembaaga Penyediaan Layanan	Kota Dumai	12 Bulan	41.108.000	
	Pengeluaran Jejeling	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil penguratan Jejeling	1 Dokumen	40.108.000	Penguratan Jejeling antar lembaga penyediaan	Penguratan Jejeling antar lembaga penyediaan	Kota Dumai	1 Dokumen	40.108.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Kota Dumai	Meningkatnya kualitas keluarga di peringkat	60%	13.196.070	PROGRAM PENINGKATAN KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga di peringkat	Kota Dumai	60%	13.196.070	
	Peningkatan kualitas keluarga	Kota Dumai	Terakasnanya pengembangan keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak	7	13.196.070	Peningkatan kualitas keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Terakasnanya pengembangan keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Kota Dumai	7	13.196.070	
	Keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Kota Dumai	Terakasnanya pengembangan keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak	1 Laporan	13.196.070	Pengembangan terakasnanya pengembangan masayarakat untuk peningkataan kualitas keluarga di kota Dumai	Terakasnanya pengembangan masayarakat untuk peningkataan kualitas keluarga di kota Dumai	Kota Dumai	1 Laporan	13.196.070	
	Pengembangan masayarakat untuk peningkataan kualitas keluarga di kota Dumai	Kota Dumai	Terakasnanya pengembangan masayarakat untuk peningkataan kualitas keluarga di kota Dumai			Keluarga dalam kesetaraan gender (KG) dan hak anak	Terakasnanya pengembangan masayarakat untuk peningkataan kualitas keluarga di kota Dumai	Kota Dumai			

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target	Program/ Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target	Kebutuhan Dana (Rp)	Capaian	Kebutuhan Dana	Catast	
	PROGRAM PENGELOLA SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Kota Dumai	Katanya menyajikan dan analisa data terpilih gender dan anak dalam penyajian dan analisis pengolahan data	1 Dokumen	Terkasannya	165.000.455	Pengolahan analisis dan penyajian data	Gender dan anak	3 Dokumen	93.404.300	Penyeleian data gender dan anak	Kabupaten/kota	3 Dokumen	71.596.155
	PENGUMPULAN, PENYAJIAN ANALISA DAN PENGOLAHAN	Kota Dumai	Terkasannya	1 Dokumen	Terakasannya	165.000.455	Pengumpulan, pengolahan analisa dan penyajian data	Gender dan anak	1 Dokumen	93.404.300	Penyeleian data gender dan anak	Kabupaten/kota	3 Dokumen	71.596.155
	PROGRAM PEMERINTAHAN HAK ANAK (PHAK)	Kota Dumai	Menyajikan dan analisa dan pengolahan data	3 Dokumen	71.596.155	Penyajian dan analisa dan pengolahan data	Kota Dumai	Penyeleian dan analisa dan pengolahan data	3 Dokumen	93.404.300	Penyeleian data gender dan anak	Kabupaten/kota	3 Dokumen	71.596.155
	PROGRAM PEMERINTAHAN HAK ANAK (PHAK)	Kota Dumai	Menyajikan dan analisa dan pengolahan data	3 Dokumen	71.596.155	Penyajian dan analisa dan pengolahan data	Kota Dumai	Penyeleian dan analisa dan pengolahan data	3 Dokumen	93.404.300	Penyeleian data gender dan anak	Kabupaten/kota	3 Dokumen	71.596.155
	PELEMBAGAAN PHA	Kota Dumai	Jumlah lembaga pemerintah, non lembaga	101.613.840	PELEMBAGAAN PHA	101.613.840	Jumlah lembaga pemerintah, non lembaga	Kota Dumai	135 Lemba	135 Lemba	Jumlah lembaga pemerintah, non lembaga	Kota	135 Lemba	101.613.840
	PELEMBAAGAAN PHA	Kota Dumai	Jumlah lembaga pemerintah, non lembaga	101.613.840	PELEMBAGAAN PHA	101.613.840	Jumlah lembaga pemerintah, non lembaga	Kota Dumai	135 Lemba	135 Lemba	Jumlah lembaga pemerintah, non lembaga	Kota	135 Lemba	101.613.840
	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN	Kota Dumai	Jumlah organisasi jumla	49.679.500	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN	49.679.500	Jumlah organisasi jumla	Kota Dumai	92 Organisasi	92 Organisasi	Jumlah organisasi jumla	Kota	92 Organisasi	49.679.500
	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN	Kota Dumai	Pemerintah, non pemerintah, media dan lembaga	49.679.500	ADVOKASI KEBIJAKAN DAN PENDAMPINGAN	49.679.500	Pemerintah, non pemerintah, media dan lembaga	Kota Dumai	92 Organisasi	92 Organisasi	Advokasi kebijakan dan pendampingan	Kabupaten/kota	92 Organisasi	49.679.500

No	Cataatan	Program / Sub Kegiatan		Lokasi	Indikator	Target	Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
		Kordinasi dan sinkronisasi	Kordinasi dan sinkronisasi		Pagu Indikatif (Rp)	Keigatan / Sub Capaian	Lokasi	Indikator
	Kordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen hasil	2 Dokumen	Kota Dumai	51.934.340	Kordinasi dan sinkronisasi	Koordinasi dan sinkronisasi	Kordinasi dan sinkronisasi
	Kordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen hasil	2 Dokumen	Kota Dumai	99.004.200	Penyebarluasan dan pengembangan	Teraksesnya dan pengembangan	Teraksesnya dan pengembangan
	Kordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen hasil	20 Lembaaga	Kota Dumai	99.004.200	Penyebarluasan dan pengembangan	Teraksesnya dan pengembangan	Teraksesnya dan pengembangan
	Kordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen hasil	15 laporan	Kota Dumai	59.998.600	Penyebarluasan dan pengembangan	Jumlah anak yang mendapatkan layanan	59.998.600
	Kordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Kota Dumai	21.286.400	Penyebarluasan dan pengembangan	Jumlah dokumen	21.286.400
	Kordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen	1 Dokumen	Kota Dumai	21.286.400	Penyebarluasan dan pengembangan	Jumlah dokumentasi	21.286.400
	Kordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen	2 Dokumen	Kota Dumai	17.719.200	Terselenggaranya	Penyebarluasan dan pengembangan	17.719.200
	Kordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen	2 Dokumen	Kota Dumai	110.052.600	PERLINDUNGAN	Mengikatnya perlindungan khusus	110.052.600
	Kordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen	40%	Kota Dumai	PERLINDUNGAN	KHUSUS ANAK	Merilengkannya khusus	40%
	Kordinasi dan sinkronisasi	Jumlah dokumen	40%	Kota Dumai	110.052.600	PERLINDUNGAN	Merilengkannya khusus	110.052.600

No	Catatan Penitng						
	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Kimereja	Tindikator	Target	Gapaihan	Kebutuhan Dana (Rp)
Penyedia layanan bagi anak yang	Kota	Tersedianya layanan bagi anak yang	12 bulan	55.835.200	Penyediaan khusus bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	daerah	55.835.200
Koordinasi dan sinkronisasi	Kota Dumai	lajut layanan tindak meremukam yang mendampingan anak	1.050.000	1.050.000	Koordinasi dan sinkronisasi tindak meremukam yang mendampingan anak	Kabupaten/kota	1.050.000
Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang	Kota Dumai	lumah dokumen	1	14.834.900	Pengembangan komunikasi, informasi dan edukasi anak yang	Kabupaten/kota	14.834.900
Pengaturan jafaring	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil pengaturan jeafiring	1 Dokumen	39.950.300	Pengaturan jafaring antar lembaga	Kabupaten/kota	39.950.300
Pengaturan penyedia	Kota Dumai	Jumlah dokumen hasil pengaturan	1 Dokumen	39.950.300	Pengaturan jafaring antar lembaga	Kabupaten/kota	39.950.300
Teraksesananya pengaturan dan pengembangan	Kota Dumai	54.217.400	12 Bulan	54.217.400	Teraksesananya pengaturan dan pengembangan	Kabupaten/kota	54.217.400
Pengaturan dan pengembangan lembaga penyedia	Kota Dumai	54.217.400	12 Bulan	54.217.400	Pengaturan dan pengembangan lembaga penyedia	Kabupaten/kota	54.217.400

No	Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Kegiatan/Sub Capaian	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penitng	TOTAL	
											6.505.333.521,00	6.505.333.521,00
	Kordinasi dan sinkronisasi	Dumai	Kordinasi dan sinkronisasi	54.217.400	Kordinasi dan sinkronisasi	Penyekretariat Kapasitas	sumber daya lembaga	daya lembaga	penyeleksi sumber daya lembaga	54.217.400	Dumai, 02 Februari 2022	KEPALA DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN

NIP. 19680529 198903 2 002

MAINI ASNA SKM. M.Si



2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diajukan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan publik, maupun didasarkan hasil dari pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang RKPD.

Maka hasil Penelaahan terhadap Usulan Program dan Kegiatan berdasarkan usulan dari unit Bidang pada Dinas PPPA Kota Dumai dijelaskan dalam tabel T-C.32 berikut ini :

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kota Dumai

Nama Perangkat daerah : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)

Dumai, 02 Februari 2022

KEPALA DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI



MAINI ASNA, SKM, M.Si
NIP. 19680529 198903 2 002

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2021-2026 terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagai berikut :

1. Arah kebijakan pemberdayaan perempuan.
 - 1) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG).
 - 2) Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.
2. Arah kebijakan perlindungan anak.
 - 1) Peningkatan kualitas hidup dan tumbuh kembang anak yang optimal.
 - 2) Peningkatan perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploritasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya.
- 3) Peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Sedangkan sasaran kebijakan RPJMN, sebagai berikut:

- a) Sasaran Pemberdayaan Perempuan.

Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Berdasarkan pasal 258 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi "Kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian berdasarkan pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Daerah untuk mencapai target", Dinas PPPA Kota Dumai yang merupakan bagian dari OPD Pemerintah Kota Dumai yang memiliki urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada arah kebijakan nasional dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI. Agar sinkronisasi dan harmonisasi antara Kementerian PPPA RI dengan Dinas PPPA di Provinsi/Kab/Kota dapat terwujud maka diperlukan adanya penyelarasan kegiatan prioritas nasional yang didukung oleh Kementerian/Lembaga (APBN) dengan kegiatan

pendukung dari daerah yang bersumber dari APBD. Adapun prioritas pembangunan rencana kerja pemerintah daerah Kota Dumai tahun 2023 sebagai berikut :

1. Pembangunan ekonomi masyarakat sebagai pendukung aktivitas industry dan kepelabuhan.
2. Pengembangan kualitas sumberdaya manusia yang berbudaya melayu
3. Peningkatan kualitas infrastruktur untuk peningkatan pelayanan dasar dan penunjang aktivitas ekonomi
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
5. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

1. Tujuan

Tujuan yang akan ditempuh dalam lima tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah : Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, serta pemnuhan hak perempuan dan anak di Kota Dumai

2. Sasaran

Sasaran yang akan ditempuh dalam lima tahun Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlidungan Anak Kota Dumai adalah : Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan

3. Kebijakan

- a. Penurunan kasus kekerasan perempuan termasuk TPPO yang fokus pada peningkatan, pencegahan, pelayanan, pemberdayaan korban kekerasan perempuan, dan penguatan lembaga/jaringan.
- b. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender yang berfokus pada PPRG serta monitoring dan evaluasi pada setiap OPD dalam pelaksanaan PPRG
- c. Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan yang berfokus pada pemberdayaan, monitoring, dan evaluasi perempuan potensial bakal calon anggota legislatif, legislatif dan jabatan publik
- d. Meningkatnya pelayanan PUSPAGA yang sesuai standar yang berfokus pada pelatihan tenaga terampil dan penguatan kelembagaan PUSPAGA.
- e. Meningkatnya usaha ekonomi yang dikelola perempuan berfokus pada pelatihan keterampilan dan manajemen usaha dan pendampingan kelompok

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) dan Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS).

- f. Peningkatan kualitas kelembagaan organisasi perempuan dan anak yang berfokus pada pembinaan kelembagaan organisasi perempuan dan anak
- g. Peningkatan keterlibatan pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha dalam Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) yang berfokus pada peningkatan predikat Kota Layak Anak
- h. Pemberian pelayanan konseling, mediasi dan pendampingan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan
- i. Peningkatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan perempuan dan anak
- j. Mewujudkan kota Dumai sebagai kota layak anak

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disampaikan oleh Walikota dan Wakilkota terpilih pada saat kampanye, maka visi pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2021 – 2026 yaitu

"TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG UNGGUL DAN BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU"

Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yaitu:

- 1) Masyarakat Dumai yang makmur; keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan batin.
 - a) Layak: wajar; pantas; patut; mulia; terhormat
 - b) Lahir: keduriaan; jasmani
 - c) Batin: sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya).
- 2) Masyarakat Dumai yang madani: Keadaan masyarakat kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban.
 - a) Nilai : sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai hakikatnya
 - b) Norma : aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku

yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;

- c) Hukum : peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.
- d) Berperadaban yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa dan kebudayaan suatu bangsa.

3) Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing yang berarti Misi ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan. Hal ini disadari karena manusia sebagai Objek dan Subjek dalam pembangunan yang diarahkan agar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif dalam mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Sejalan dengan pesatnya pembangunan serta terbukanya arus globalisasi sehingga dikehutuhan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing global.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

- 1.1 Mengembangkan perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhan dan industri.
- 2.1 *Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu.*
 - 3.1 Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas.
 - 4.1 Meningkatkan kualitas tata Kelola kepemerintahan daerah yang baik Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai mendukung pencapaian misi ke -2 "*Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berjati diri melayu*" Adapun tujuan yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai adalah Tervujudnya kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak perempuan dan anak di kota

3.3.1 PROGRAM

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBD.

Ada 7 (Tujuh) program yang direncanakan oleh Dinas PPPA Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Urusan pemerintah Daerah Kabupaten/kota
2. Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
3. Program Perlindungan Perempuan
4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
5. Program Pengelolaan sistem data gender dan anak
6. Program Perlindungan hak anak (PHA)
7. Program Perlindungan khusus anak

3.3.2 KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan penggerahan sumber daya, berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemuanya jenis sumber daya tersebut.

Ada 20 (Dua puluh) kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi keuangan perangkat daerah
3. Administrasi barang milik daerah
4. Administrasi kepegawaian perangkat daerah
5. Administrasi umum perangkat daerah
6. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
7. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
8. Pelembagaan pengarutamaan gender (PUG) pada Lembaga pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota
9. Pemberdayaan perempuan bidang politik,hukum,social, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota

10. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kabupaten/Kota
11. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten/kota
12. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/Kota
13. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan tingkat daerah kabupaten/kota
14. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah Kabupaten/Kota
15. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kabupaten/Kota
16. Pengumpulan, pengolahan nalisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat daerah kabupaten/kota
17. Pelembagaan PHA pada Lembaga pemerintah, Nonpemerintah, dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
18. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/Kota
19. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/Kota
20. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota

Kode	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
	Target Capaikan Kinerja		Indikator Kinerja		Praaktikan Mulai Renovana Tahun 2024				Renovana Tahun 2023	
Urusan/Blidang	Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi	Output	Pengeluaran	Target Capaikan Kinerja	Target	
										Pagu Indikatif (Rp.)
										Kebutuhan Dana/
2. 8. 1. 2.01. 01	PERENCANAAN Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen	Perencanaan Penganggaran	Terusunnya Semua Kab/Kota,	100 %	3 Dokumen	19.702.500	Dana	100 %	25.000.000
2. 8. 1. 2.01. 02	Kordinasi dan Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen RKA-	Perencanaan Penganggaran hasil	Terusunnya Semua Kab/Kota,	100 %	2 Dokumen	8.749.800	Dana	100 %	35.000.000
2. 8. 1. 2.01. 03	Kordinasi dan Dokumen Penganggaran	Jumlah Dokumen Penganggaran	Perencanaan Penganggaran	Terusunnya Semua Kab/Kota,	100 %	2 Dokumen	4.048.600	Dana	100 %	7.000.000
2. 8. 1. 2.01. 04	Kordinasi dan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-	Perencanaan Dokumen DPA-SKPD	Terusunnya Semua Kab/Kota,	100 %	2 Dokumen	4.056.900	Dana	100 %	8.000.000
2. 8. 1. 2.01. 05	Kordinasi dan Dokumen Perbaahan	Jumlah Dokumen Perbaahan	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terusunnya Semua Kab/Kota,	100 %	2 Dokumen	2.970.700	Dana	100 %	5.000.000
2. 8. 1. 2.01. 06	Kordinasi dan Dokumen Penyusunan	Jumlah Dokumen	Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Terusunnya Semua Kab/Kota,	100 %	2 Dokumen	19.194.800	Dana	100 %	20.000.000
2. 8. 1. 2.01. 07	Evaluasi Kinerja	Presentase	Penyusunan laporan	Terusunnya Semua Kab/Kota,	100 %	1 Laporan	8.627.700	Dana	100 %	10.000.000
2. 8. 1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase	Penyusunan laporan	Terusunnya Semua Kab/Kota,	100 %	1 Laporan	4.036.872.996	Dana	100 %	4.644.754.209

TAHUN 2023 DAN PERKIRANA MAJU TAHUN 2024 KOTA DUMAI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH KABUPATEN/KOTA

2. 8. 1.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7.502.575.581	8.782.895.909
2. 8. 1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DERAH KABUPATEN/KOTA	6.441.938.716	7.443.960.371
2. 8. 1. 2.01.	PERENCANAAN Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	67.351.000	110.000.000
2. 8. 1. 2.01. 01	PERENCANAAN Dokumen Penganggaran	19.702.500	25.000.000
2. 8. 1. 2.01. 02	Kordinasi dan Dokumen Penganggaran	8.749.800	35.000.000
2. 8. 1. 2.01. 03	Kordinasi dan Dokumen Penganggaran	4.048.600	7.000.000
2. 8. 1. 2.01. 04	Kordinasi dan Dokumen DPA-SKPD	4.056.900	8.000.000
2. 8. 1. 2.01. 05	Kordinasi dan Dokumen Perbaahan	2.970.700	5.000.000
2. 8. 1. 2.01. 06	Kordinasi dan Dokumen Penyusunan	19.194.800	20.000.000
2. 8. 1. 2.01. 07	Evaluasi Kinerja	8.627.700	10.000.000
2. 8. 1. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.036.872.996	4.644.754.209

TABLE-T-C-33

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Program/	Pengetahuan Gaji dan Penyajian ASN	Presentase Tunjangan ASN Pemerintah daerah kecuali penanggantaraan penunjang urusan diluar dalam kota	Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2024	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023		Prakiraaan Maju Rencana Tahun 2024		
					Target Capaikan Kinerja	Target Capaikan Kinerja	Lokasi Output Penit 9	Pagu Lindikatif (Rp.)	Sumber Dana	Tolok Ukur Target	Pagu Lindikatif (Rp.)
2.03	Admistrasi Barang Milik Deraah	Jumlah Laporan Keuanginan	Presentase Pencairan SKPD penunjang urusan diluar dalam kota	35.000.000	100 %	2 Dokumen	29.992.600	Dana	Presentase penunjang urusan diluar dalam kota	100 %	100.411.62
2.04	Admistrasi Kegiatan Perangkat Deraah	Jumlah Laporan Keuanginan	Presentase Pencairan SKPD penunjang urusan diluar dalam kota	35.000.000	100 %	2 Dokumen	60.184.080	Dana	Presentase penunjang urusan diluar dalam kota	100 %	55.411.692
2.05	Admistrasi Pegawai	Jumlah Pegawai	Presentase Pencairan Tugas dan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	20.000.000	100 %	5 Dokumen	48.184.080	Dana	Presentase penunjang urusan diluar dalam kota	100 %	20.000.000
2.06	Admistrasi Umum Perangkat Deraah	Jumlah Drang Yang Menyampaikan Teks	Presentase Penyaluran Kita Peraturan Menyampaikan Teks	25.000.000	100 %	5 Dokumen	6.500.000	Dana	Presentase penunjang urusan diluar dalam kota	100 %	25.000.000
2.07	Admistrasi Penyelesaian Penyelesaian Dokumen	Jumlah Paket Penyelesaian Penyelesaian Dokumen	Presentase Penyelesaian Penyelesaian Dokumen	389.974.370	100 %	358.599.201					
2.08	Admistrasi Komponen Penyelehan Komponen	Jumlah Paket Komponen	Presentase Penyelehan Komponen	10.000.000	100 %	1 Dokumen	8.950.300	Dana	Presentase penunjang urusan diluar dalam kota	100 %	10.000.000
2.09	Admistrasi Lislik/Penerangan Penyelehan Lislik/Penerangan	Jumlah Paket Kita Penyelehan Lislik/Penerangan	Presentase Penyelehan Kita Penyelehan Lislik/Penerangan	10.000.000	100 %	1 Dokumen	8.590.300	Dana	Presentase penunjang urusan diluar dalam kota	100 %	10.000.000
2.10	Admistrasi Penyelesaian Penyelesaian Dokumen	Jumlah Paket Penyelesaian Penyelesaian Dokumen	Presentase Penyelesaian Penyelesaian Dokumen	10.000.000	100 %	1 Paket	100 %	Dokumen	Presentase penunjang urusan diluar dalam kota	100 %	82.000.000
2.11	Bimbingan Teknis	Jumlah Drang Yang Menyampaikan Teks	Presentase Penyaluran Kita Peraturan Menyampaikan Teks	82.000.000	100 %	1 Dokumen	73.925.001	Dana	Presentase penunjang urusan diluar dalam kota	100 %	82.000.000
2.12	Penyelehan Perlatan	Jumlah Paket Perlatan	Presentase Penyelehan Kita Penyelehan	82.000.000	100 %	1 Paket	100 %	Dokumen	Presentase penunjang urusan diluar dalam kota	100 %	82.000.000

Kode	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2023				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Catatan Penit	Sumber	Output Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Penit	Tarok Ukar	Target
2.08.01.2.06.03	Penyeleksiann Peralatan	Jumlah Paket Peralatan	Rumah Tangga yang penunjangn ususan	Presentase	14.994.400 Dana	1 Paket	1 Dokumen	14.994.400 Dana	Presentase	100 %
2.08.01.2.06.04	Penyeleksiann Bahan	Jumlah Paket Bahan Logistik	Kantor Yang Disediakan	Presentase	38.285.900 Dana	1 Paket	1 Dokumen	38.285.900 Dana	Presentase	100 %
2.08.01.2.06.05	Penyeleksiann Barang	Jumlah Paket Barang	Cekakan dan Penggandaan	Presentase	34.999.800 Dana	3 Paket	1 Dokumen	34.999.800 Dana	Presentase	100 %
2.08.01.2.06.06	Penyeleksiann Bahan	Jumlah Dokumen Bahan	Bacakan dan Peraturan	Presentase	9.216.000 Dana	1 Dokumen	1 Dokumen	9.216.000 Dana	Presentase	100 %
2.08.01.2.06.07	Penyeleksiann Kendaraan	Jumlah Unit Kendaraan	Peraturan Dinas atau	Presentase	400.000.000 Dana	1 Unit	24 Unit	400.000.000 Dana	Presentase	100 %
2.08.01.2.07.01	Penyeleksiann Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Pendukung	Peraturan Dinas atau	Presentase	885.000.000	1 Unit	24 Unit	885.000.000	Presentase	100 %
2.08.01.2.07.02	Penyeleksiann Mebel	Jumlah Paket Mebel yang	Peraturan Dinas atau	Presentase	70.000.000 Dana	14 Unit	24 Unit	70.000.000 Dana	Presentase	100 %
2.08.01.2.07.03	Penyeleksiann Perlatalan	Jumlah Unit Perlatalan dan	Peraturan Dinas atau	Presentase	90.000.000 Dana	8 Unit	24 Unit	90.000.000 Dana	Presentase	100 %
2.08.01.2.07.04	Penyeleksiann Perlatalan	Jumlah Unit Perlatalan dan	Peraturan Dinas atau	Presentase	100 % 14 Unit	14 Unit	24 Unit	100 % 14 Unit	Presentase	100 %
2.08.01.2.07.05	Penyeleksiann Perlatalan	Jumlah Paket Mebel yang	Peraturan Dinas atau	Presentase	70.000.000 Dana	100 % 14 Unit	24 Unit	70.000.000 Dana	Presentase	100 %
2.08.01.2.07.06	Penyeleksiann Perlatalan	Jumlah Unit Perlatalan dan	Peraturan Dinas atau	Presentase	90.000.000 Dana	100 % 8 Unit	24 Unit	90.000.000 Dana	Presentase	100 %
2.08.01.2.07.07	Penyeleksiann Perlatalan	Jumlah Unit Perlatalan dan	Peraturan Dinas atau	Presentase	100 % 10 Unit	10 Unit	24 Unit	100 % 10 Unit	Presentase	100 %
2.08.01.2.07.08	Penyeleksiann Perlatalan	Jumlah Unit Perlatalan dan	Peraturan Dinas atau	Presentase	325.000.000 Dana	100 % 1 Unit	24 Unit	325.000.000 Dana	Presentase	100 %
2.08.01.2.07.09	Penyeleksiann Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan	Peraturan Gedung Kantor	Presentase	877.714.000	1 Unit	24 Unit	877.714.000	Presentase	100 %
2.08.01.2.07.10	Penyeleksiann Sarana dan	Jumlah Unit Sarana dan	Peraturan Gedung Kantor	Presentase	3.737.500.000	100 %	100 %	3.737.500.000	Presentase	100 %
2.08.01.2.08	Penyeleksiann Jasa Penunjang Ursusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Ursusan	Kantor atau Bangunan	Presentase	1.008.570.100	100 %	100 %	1.008.570.100	Presentase	100 %

Kode	Rencana Tahun 2023										
	Indikator Kinerja		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Target Cepat Kinerja		Target Cepat Kinerja		Indikator Kinerja		
Urusan/Bidang		Penyelehan Penyediaan		Jumlah Laporan Penyediaan		Tersedianya Laporan		Jumlah Laporan Penyediaan		Penyelehan dan Sumber	
Penyelehan dan Sumber		Penyelehan dan Sumber		Penyelehan dan Sumber		Penyelehan dan Sumber		Penyelehan dan Sumber		Penyelehan dan Sumber	
2.08.01.2.08.01	Penyelehan Jasa Surat	Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan	Tersedianya Laporan	174.000	Dana	100 %	1 Laporan	50 laporan	115.000.000	132.250.000
2.08.01.2.08.02	Penyelehan Jasa	Kemultiasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan	Tersedianya Laporan	115.000.000	Dana	100 %	1 Laporan	50 laporan	115.000.000	132.250.000
2.08.01.2.08.03	Penyelehan Jasa	Perbaikan dan Penyelehan	Jumlah Laporan Penyediaan	Tersedianya Laporan	13.740.000	Dana	100 %	1 Laporan	50 laporan	13.740.000	861.120.000
2.08.01.2.08.04	Penyelehan Jasa	Pelayanan	Jumlah Laporan Penyediaan	Tersedianya Laporan	746.800.000	Dana	100 %	1 Laporan	50 laporan	385.300.000	50.000.000
2.08.01.2.08.05	Penyelehan Jasa	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	1 Unit	34 unit	34 unit	34 unit	126.224.839	137.500.000
2.08.01.2.09.01	Penyelehan Barang Milik Daerah	Pemenujung Ursusna	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	1 Unit	34 unit	34 unit	34 unit	385.300.000	50.000.000
2.08.01.2.09.02	Penyelehan Biaya Pendidikan	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	5 Unit	34 unit	68.221.000	Dana	100 %	65.000.000
2.08.01.2.09.03	Penyelehan Biaya Pendidikan	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	5 Unit	34 unit	68.221.000	Dana	100 %	65.000.000
2.08.01.2.09.04	Penyelehan Biaya Pendidikan	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	8 Unit	34 unit	5.680.000	Dana	100 %	6.500.000
2.08.01.2.09.05	Penyelehan Biaya Pendidikan	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	8 Unit	34 unit	5.680.000	Dana	100 %	6.500.000
2.08.01.2.09.06	Penyelehan Biaya Pendidikan	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	8 Unit	34 unit	5.680.000	Dana	100 %	6.500.000
2.08.01.2.09.07	Penyelehan Biaya Pendidikan	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	8 Unit	34 unit	5.680.000	Dana	100 %	6.500.000
2.08.01.2.09.08	Penyelehan Biaya Pendidikan	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	11 Unit	34 unit	7.083.839	Dana	100 %	8.000.000
2.08.01.2.09.09	Penyelehan Biaya Pendidikan	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	11 Unit	34 unit	7.083.839	Dana	100 %	8.000.000
2.08.01.2.09.10	Penyelehan Biaya Pendidikan	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	11 Unit	34 unit	7.083.839	Dana	100 %	8.000.000
2.08.01.2.09.11	Penyelehan Biaya Pendidikan	Pembangunan	Jumlah Kependidikan	Tersedianya	100 %	11 Unit	34 unit	6.710.000	Dana	100 %	8.000.000

Kode	Indikator Kinerja									Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Target Capaian Kinerja	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output	Output	Progr	Kegiatan	am	Target Utkur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
2.8.2	PROGRAM PENGRASUTAMAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN											
2.8.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaran Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Skirkripsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelepasan dan Simkrinisasi	Tercapainya Semua Kebutuhan dan Kewenangan	15 %	1 Dokumen	100 %	62.656.100 Dana Transfer	62.657.200	110.005.780	72.054.515	
2.8.2.02	PROGRAM PENGRASUTAMAN GENDER DAN PEMERDAYAAN PEREMPUAN	Koordinasi dan Skirkripsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelepasan dan Simkrinisasi	Tercapainya Semua Kebutuhan dan Kewenangan	15 %	1 Dokumen	100 %	62.656.100 Dana Transfer	309.801.900	356.272.185	72.054.515	
2.8.2.03	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaran Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Skirkripsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelepasan dan Simkrinisasi	Tercapainya Semua Kebutuhan dan Kewenangan	15 %	1 Dokumen	100 %	62.656.100 Dana Transfer	95.657.200	110.005.780	72.054.515	
2.08.02.201	Advokasi kebijakan dan pelaksanaan PUG	Advokasi kebijakan dan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Pelepasan dan Simkrinisasi	Tercapainya Semua Kebutuhan dan Kewenangan	15 %	1 Dokumen	100 %	62.656.100 Dana Transfer	12.044.00	13.851.060	24.100.205	
2.08.02.201.01	Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan PUG	Advokasi kebijakan dan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Pelepasan dan Simkrinisasi	Tercapainya Semua Kebutuhan dan Kewenangan	15 %	1 Dokumen	100 %	20.956.700 Dana Transfer	100.824.800	115.948.520	24.100.205	
2.08.02.201.02	Partisipasi pemenuhan hak dan kewenangan gender	Partisipasi pemenuhan hak dan kewenangan gender	Jumlah Dokumen Hasil Pelepasan dan Simkrinisasi	Tercapainya Semua Kebutuhan dan Kewenangan	15 %	1 Dokumen	100 %	20.956.700 Dana Transfer	97.262.600 Dana Transfer	111.851.990	24.100.205	
2.08.02.202	Advokasi kebijakan dan pelaksanaan PUG	Advokasi kebijakan dan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Pelepasan dan Simkrinisasi	Tercapainya Semua Kebutuhan dan Kewenangan	15 %	1 Dokumen	100 %	3.562.200 Dana Transfer	3.562.200 Dana Transfer	4.096.530	24.100.205	
2.08.02.202.01	Sosialisasi pemenuhan hak dan kewenangan gender	Partisipasi pemenuhan hak dan kewenangan gender	Jumlah Dokumen Hasil Pelepasan dan Simkrinisasi	Tercapainya Semua Kebutuhan dan Kewenangan	15 %	1 Dokumen	100 %	97.262.600 Dana Transfer	97.262.600 Dana Transfer	111.851.990	24.100.205	
2.08.02.202.02	Advokasi kebijakan dan pelaksanaan PUG	Advokasi kebijakan dan pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Pelepasan dan Simkrinisasi	Tercapainya Semua Kebutuhan dan Kewenangan	15 %	1 Dokumen	100 %	3.562.200 Dana Transfer	113.319.900	130.317.885	24.100.205	

Kode	Urusan/Blangguan Kegiatan/Program/Urusan/Blangguan Kegiatan/Sub Kegiatan/Kinerja	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Output Sumber	Tolok Ukur	Target	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023		Pakiraihan Maju Rencana Tahun 2024								
									Target Capaikan Kinerja	Capaikan Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber	Catatan	Tarol Kinerja	Keleburhan Dina/Kebutuhan Dina/Kinerja	Pagu Indikatif	Meningkatnya	Dana	Transfer	Transfer	30%
2 08 03 2.03	Peraydaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situs Daurat dan Kondisi Stratus Kewenangan dan Kebutuhan Sosial	Jumlah Perempuan dalam Stratus Daurat dan Kondisi Stratus Kewenangan dan Kebutuhan Sosial	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	30 %	50 Orang	12 bulan	60.000.000	Dana Transfer	Transfer	Transfer	Umunum.	Meningkatnya	30%	69.000.000					
2 08 03 2.04	Pengetahuan Jelajah Mengakatya	Jumlah Dokumen yang Mengakatya	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	30 %	1 Dokumen	12 bulan	40.108.000	Dana	Transfer	Transfer	Umunum.	Meningkatnya	30%	20.000.000					
2 08 03 2.05	Pengetahuan Jelajah Mengakatya	Jumlah Dokumen yang Mengakatya	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	30 %	1 laporan	7 kecamatan	13.196.070	Dana	Transfer	Transfer	Umunum.	Meningkatnya	30%	15.175.480					
2 08 04 2.01	Pengetahuan Jelajah Mengakatya	Jumlah Dokumen yang Mengakatya	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	80 %	1 laporan	7 kecamatan	13.196.070	Dana	Transfer	Transfer	Umunum.	Meningkatnya	30%	15.175.480					
2 08 04 2.02	Penyalaman Data Pengetahuan Mengakatya	Jumlah Dokumen yang Mengakatya	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	30 %	1 laporan	7 kecamatan	13.196.070	Dana	Transfer	Transfer	Umunum.	Meningkatnya	30%	15.175.480					
2 08 05 2.01	Penyalaman Data Mengakatya	Jumlah Dokumen yang Mengakatya	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	35 %	3 Dokumen	6 Dokumen	93.404.300	Dana	Transfer	Transfer	Umunum.	Meningkatnya	35 %	107.414.945					
2 08 05 2.02	Penyalaman Data Mengakatya	Jumlah Dokumen yang Mengakatya	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	35 %	3 Dokumen	6 Dokumen	93.404.300	Dana	Transfer	Transfer	Umunum.	Meningkatnya	35 %	107.414.945					
2 08 05 2.03	Penyalaman Data Mengakatya	Jumlah Dokumen yang Mengakatya	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	35 %	3 Dokumen	6 Dokumen	93.404.300	Dana	Transfer	Transfer	Umunum.	Meningkatnya	35 %	107.414.945					
2 08 05 2.04	Penyalaman Data Mengakatya	Jumlah Dokumen yang Mengakatya	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	35 %	3 Dokumen	6 Dokumen	93.404.300	Dana	Transfer	Transfer	Umunum.	Meningkatnya	35 %	107.414.945					
2 08 05 2.05	Penyalaman Data Mengakatya	Jumlah Dokumen yang Mengakatya	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	Hasil Kegiatan	35 %	3 Dokumen	6 Dokumen	93.404.300	Dana	Transfer	Transfer	Umunum.	Meningkatnya	35 %	107.414.945					
2 08 05 2.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)								375.618.040								411.860.785				
2 08 06 2.01	Pelembagaan PHA pada Lemaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Duni Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota								101.613.840								117.131.425				

Kode	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2023		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
	Target Capaikan Kinerja	Lokasi Kegiatan	Pagu Indikator	Sumber Dana	Catatan	Tarok Ukar	Target
08 06 2.01 01 Advoaksi Kebijakan dan Meningkatnya Pendampingan Organisasi	Jumlah lembaga Perempuan yang mendukung Organisasi	Capaikan kota layak Pemerintah, Non Media dan Duta Usaha yang berperan Mendukung Organisasi	92 Organisasi	49.679.500 Dana	Meningkatnya capaikan kota layak anak	75 %	57.131.425
08 06 2.01 02 Koordinasi dan Skimkoasi Meningkatnya Pendampingan Organisasi	Jumlah lembaga Perempuan yang mendukung Organisasi	Capaikan kota layak Pemerintah, Non Media dan Duta Usaha yang berperan Mendukung Organisasi	92 Lembaaga	51.934.340 Dana	Meningkatnya capaikan kota layak anak	75 %	60.000.000
08 06 2.02 01 Pengelolaan dan Lembaaga Perempuan Pendampingan Organisasi	Jumlah Anak yang mendukung Organisasi	Capaikan kota layak Pemerintah, Non Media dan Duta Usaha yang berperan Pendampingan Organisasi	3 Kegiatan	93.998.600 Dana	Meningkatnya capaikan kota layak anak	75 %	69.000.000
08 06 2.02 02 Pengembangan dan Lembaaga Perempuan Pendampingan Organisasi	Jumlah Anak yang mendukung Organisasi	Capaikan kota layak Pemerintah, Non Media dan Duta Usaha yang berperan Pendampingan Organisasi	3 Kegiatan	93.998.600 Dana	Meningkatnya capaikan kota layak anak	75 %	294.729.360
08 06 2.02 03 Pengembangan dan Lembaaga Perempuan Pendampingan Organisasi	Jumlah Anak yang mendukung Organisasi	Capaikan kota layak Pemerintah, Non Media dan Duta Usaha yang berperan Pendampingan Organisasi	3 Kegiatan	196.286.400 Dana	Meningkatnya pengembangan Komunitas Informasi	75 %	225.729.360
08 06 2.02 04 Pengelolaan dan Lembaaga Perempuan Pendampingan Organisasi	Jumlah Anak yang mendukung Organisasi	Capaikan kota layak Pemerintah, Non Media dan Duta Usaha yang berperan Pendampingan Organisasi	3 Kegiatan	177.192.00 Dana	Meningkatnya capaikan kota layak anak	75 %	0
08 07 2.02 01 Pengelolaan Layanan Meningkatnya Pendampingan Organisasi	Jumlah anak yang mendukung Organisasi	Capaikan kota layak Pemerintah, Non Media dan Duta Usaha yang berperan Pendampingan Organisasi	3 Kegiatan	150.052.600 Dana	PROGRAM PERILDUNGAN KHUSUS ANAK	201.000.000	201.000.000
08 07 2.02 02 Pengelolaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Menghadapi Tingkat Derasah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendukung Organisasi	Capaikan kota layak Pemerintah, Non Media dan Duta Usaha yang berperan Pendampingan Organisasi	3 Kegiatan	95.835.200 Dana	Perlindungan Masyarakat	136.000.000	136.000.000
08 07 2.02 03 Pengelolaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Menghadapi Tingkat Derasah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendukung Organisasi	Capaikan kota layak Pemerintah, Non Media dan Duta Usaha yang berperan Pendampingan Organisasi	3 Kegiatan	40.000.000 Dana	Meningkatnya khusus anak transfer Umum-	50 %	46.000.000
08 07 2.02 04 Pengelolaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Menghadapi Tingkat Derasah Kabupaten/Kota	Jumlah anak yang mendukung Organisasi	Capaikan kota layak Pemerintah, Non Media dan Duta Usaha yang berperan Pendampingan Organisasi	3 Kegiatan	40 orang	Tingkat Derasah Kabupaten/Kota	50 %	

BAB IV

PENUTUP

4.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Berdasarkan analisa SWOT, tantangan dan peluang Dinas PPPA Kota Dumai dalam meningkatkan pelayanan adalah sebagai berikut :

1. Strengths (S) / Kekuatan :
 - a. Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan
 - b. Adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
 - c. Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
2. Weakness (W) / Kelemahan :
 - a. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal.
 - b. Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan perencanaan serta penganggaran responsif gender
 - c. Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
3. Opportunities (O) / Peluang :
 - a. Kebijakan kesetaraan dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJPN, RPJMN, dan RPJMD Provinsi Riau, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
 - b. UU 23 tahun 2014 mengamanatkan sinkronisasi sasaran antara Kementerian, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga memudahkan pencapaian target Nasional maupun target Pemerintah Daerah dalam pembangunan responsif gender.
 - c. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) memberikan kesempatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan lembaga PBB dan atau lembaga Donor dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
 - d. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi

Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan kesepakatan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) Tahun 2015-2030.

- e. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- f. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak.
- g. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4. Threats (T) / Ancaman :

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM serta laporan evaluasi kinerja dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- b. Rendahnya keberdayaan masyarakat dalam implementasi PUG
- c. Rendahnya kualitas hidup perempuan yang ditandai oleh rendahnya keterlibatan perempuan di legislatif dan kontribusi pendapatan perempuan dalam keluarga yang dicapai oleh kabupaten/kota
- d. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO serta rendahnya peran lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO;
- e. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan responsif gender termasuk penyediaan data gender dan anak

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan atau kualitatif yang terdiri dari unsur indikator masukan (input), proses (process), keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan.

Indikator masukan (input) adalah gambaran mengenai sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output dan outcome (kuantitas, kualitas dan kehematan).

Indikator proses (process) adalah gambaran mengenai langkah-langkah yang dilaksanakan dalam menghasilkan barang atau jasa (frekwensi proses, ketetaatan terhadap jadwal dan ketetaatan terhadap ketentuan atau standar).

Indikator keluaran (output) adalah gambaran mengenai output dan bentuk barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan (kuantitas, Kualitas dan effisiensi).

Indikator hasil (outcome) adalah gambaran mengenai hasil aktual atau yang diharapkan dari barang atau jasa yang dihasilkan (peningkatan kuantitas, perbaikan proses, peningkatan effisiensi, peningkatan kualitas, perubahan perilaku, peningkatan efektivitas dan peningkatan pendapat).

Indikator dampak (impact) adalah gambaran akibat langsung atau tidak langsung dari tercapainya tujuan atau indikator outcome pada tingkat yang lebih tinggi hingga ultimate.

Rencana kinerja merupakan proses penyusunan rencana kegiatan yang didasarkan pada upaya pencapaian sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Melalui rencana kinerja berbagai kegiatan tahunan dapat disusun sesuai dengan target pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta untuk lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, telah ditetapkan Sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang harus dilaksanakan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2021-2026

No	MISI KOTA DUMAI	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	2.	3.	4.
1.	Misi ke-2 : Mewujudkan sumber daya manusia berkualitas berjati diri melayu	Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan perempuan dalam pembangunan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan	<p>1. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu sesuai standart</p> <p>2. Skor pencapaian Kota Layak Anak (KLA)</p> <p>3. Skor pencapaian Anugrah Parahita Ekapraya (APE)</p>

Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan, yaitu :

- a. Spesifik ;
- b. Dapat dicapai ;
- c. Relevan ;
- d. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur ;
- e. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Prinsip-prinsip pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, transparansi, guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Diharapkan perubahan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 ini kiranya dapat direalisasikan, sehingga permasalahan operasional yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat teratasi.

- a. Dapat dicapai ;
- b. Relevan ;

- c. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur ;
- d. Dapat dikuantifikasi dan diukur.

Prinsip-prinsip pengembangan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, transparansi, guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.

Diharapkan rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 ini kiranya dapat direalisasikan, sehingga permasalahan operasional yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai dapat teratasi.

No	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	SPM/ Standar nasional	IKK	TARGET TAHUNAN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	CAKUPAN PEREMPuan DAN ANAK KORBAN KEKERASAN YANG MENDAPAT PENANGGALAN DIDALAM UNIT PELAYANAN TERPADU SESUAI STANDART	%			95	95	95	95	95	95
2	SKOR PENCAPIAN KOTA LAYAK ANAK	SKOR			650	700	750	800	850	900
3	EKAPRAYA (APE)	SKOR			2512	3187	3862	3870	4000	4300

TAHUN 2021-2024

DINAS PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



MINI ASNA, SKM, M. SI
NIP. 19680529 198903 2 002



DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Kota Dumai
Telp. (0765) 438880 Fax (0765) 438080
DUMAI

**KEPUTUSAN
WALIKOTA DUMAI
NOMOR : 06 /SK/DPPPA/2022**

**TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2023
WALIKOTA DUMAI**

Menimbang:

- a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai yang berdayaguna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab diperlukan peningkatan budaya kerja dan etos kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas;
- b. Bahwa untuk lebih memantapkan pelaksanaan penyusunan Capaian Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta mewujudkan Good Governance Perlu disusun dan disampaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023;
- c. Bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Walikota Dumai tentang Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4432);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pelaporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
 7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Daerah Kota Dumai Nomor 8 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 23 Seri D);
12. Peraturan walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembagunan Daerah di Kota Dumai;
13. Peraturan Walikota Dumai Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai;
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai tahun 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA DUMAI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI TAHUN 2023;

Passal 1

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2022 adalah Rencana Kerja yang akan

dilaksanakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai pada Tahun 2023.

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 merupakan Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran sesuai tugas, pokok dan fungsi, menjamin komitmen dan konsistensi perencanaan dan program serta kegiatan sebagai landasan dalam penentuan program dan kegiatan tahunan serta acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Pasal 3

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai Tahun 2023 sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : D U M A I
Pada tanggal : 02 Pebruari 2022

An. WALIKOTA DUMAI

KEPALA,



MAINIASNA, SKM, M. Si
DUMAI Pembina

NIP. 19680529 198903 2 002